

**RENCANA
STRATEGIS
(RENSTRA)
PERUBAHAN III
(RPJMD-P KABUPATEN KUBU RAYA)**

2019-2024



**SEKRETARIAT DAERAH
SEKELAKSI DAERAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ke-III Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Perubahan ke-III Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu lima tahun yang bersifat teknis operasional dan berfungsi sebagai acuan operasional di dalam terwujudnya perencanaan pembangunan sebagaimana yang dikehendaki.

Oleh sebab itu Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya mempunyai maksud dan tujuan sebagai implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu kedepan.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan ke-III Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini menjabarkan program dan kegiatan yang merupakan prioritas bagi Sekretariat Daerah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya lima tahun mendatang. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini tidak akan dapat tersusun tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Disadari bahwa Penyusunan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, tetapi mudah-mudahan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini dapat terlaksana sesuai harapan dan tahapan yang telah dilalui serta memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Sungai Raya,

2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA



YUSRAN ANIZAM, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690630 198903 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL III

DAFTAR GAMBAR IV

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. LATAR BELAKANG 1

 B. LANDASAN HUKUM 2

 C. MAKSUD DAN TUJUAN 4

 D. HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA 4

 E. SISTEMATIKA PENULISAN 5

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN 6

 A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI 6

 B. SUMBER DAYA SKPD 16

 C. KINERJA PELAYANAN SKPD 21

 D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN 29

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 30

 A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
 PELAYANAN SKPD 31

 B. TELAAH VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
 DAERAH 36

 C. TELAAH RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA 38

 D. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
 STRATEGIS 39

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 40

 A. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 40

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 42

 A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 42

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 44

 A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019-2024 44

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 50

BAB VIII PENUTUP 53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Tingkat Pendidikan	16
Tabel 2.2	Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Pangkat / Golongan	17
Tabel 2.3	Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Eselon	18
Tabel 2.4	Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Jenis Kelamin	19
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Periode Rencana Strategis Tahun 2014-2019	22
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Periode Rencana Strategis Tahun 2014-2019	23
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	32
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	41
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	43
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	45
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Rencana Strategis Sekretariat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya4

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya7

Gambar 2.2 Grafik Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan Tingkat Pendidikan17

Gambar 2.3 Grafik Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan Pangkat / Golongan18

Gambar 2.4 Grafik Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan Eselon19

Gambar 2.5 Grafik Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan Jenis Kelamin20

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang mengacu kepada RPJPD Kabupaten Kubu Raya, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Kubu Raya menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan di setiap Perangkat Daerah, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Perangkat Daerah. Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh setiap Perangkat Daerah dalam menjawab tuntutan lingkungan dan perkembangan wilayah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang di embannya. Renstra memiliki peran yang sangat penting untuk menuntun Perangkat Daerah dalam memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki. Renstra menjadi kunci yang akan menunjukkan penjabaran kebijakan melalui rencana-rencana yang sangat prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, karena itu rencana-rencana dimaksud disertai dengan target yang harus dipenuhi dan dipertanggung jawabkan pencapaiannya, sehingga secara nyata kebijakan yang diambil dapat diketahui pula pencapaiannya, dengan demikian penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan secara akuntabel. Sejalan dengan itu penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa menjadi cita-cita dan harapan setiap warga negara, tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik “*Good Governance*” yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, efisien dan efektif yakni dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Dengan demikian pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mempertanggung jawabkan segala sikap, prilaku dan kebijakan yang dibuat baik secara politik, hukum, maupun ekonomi dan di informasikan secara terbuka kepada publik.

Untuk mewujudkan *Clean and Good Governance* merupakan tantangan yang harus dipenuhi oleh pemerintah sehingga keinginan masyarakat terhadap pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat menjadi kenyataan. Langkah yang perlu dan harus dikembangkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan legitimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam rangka itu, cara pengelolaan pemerintah dan pembangunan yang perlu dilakukan adalah membangun perubahan secara bersama-sama baik perubahan sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat. Perwujudan *good governance* dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kubu Raya, memerlukan tenaga yang memiliki kompetensi dan profesionalisme serta kinerja yang tinggi. Seluruh pegawai Sekretariat Daerah harus merespon perubahan lingkungan dan perkembangan

wilayah yang demikian cepat, mampu menanggapi reformasi agar kesan masyarakat maupun kalangan swasta yang sering menilai birokrasi pemerintah sebagai birokrasi yang tidak efisien, lamban serta korup tidak lagi terjadi.

Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai dokumen induk perencanaan tingkat perangkat daerah, Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- d. penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar, antara lain :

- a. kemana pelayanan perangkat daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun;
- b. bagaimana mencapainya; dan
- c. langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10).
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaa Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya No 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuburaya Tahun 2016-2036.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman umum bagi segenap pimpinan dan staf Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam menyusun kebijakan program, dan kegiatan yang berkaitan bidang perencanaan pembangunan daerah.

Adapun tujuan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

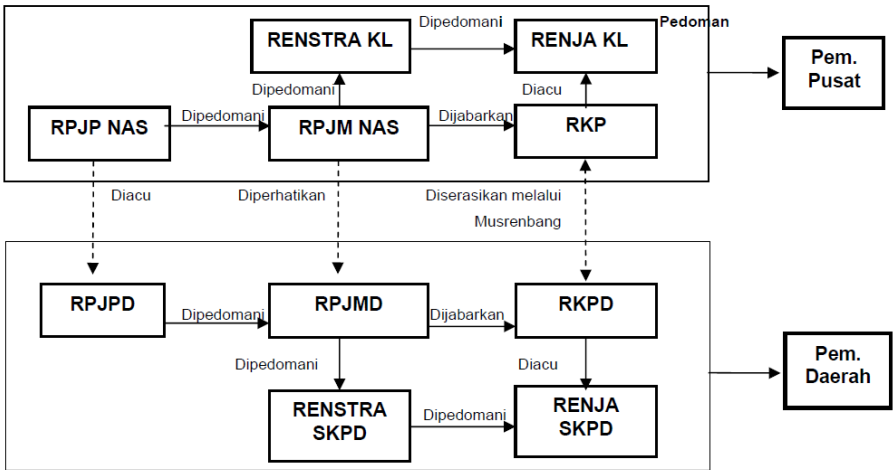
1. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung terwujudnya Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2019-2024.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam setiap tahunnya.
3. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Kubu Raya.
4. Menjamin terwujudnya konsistensi dan sinergis antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

D. HUBUNGAN RENCANA STRATEGIS DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dan bersifat indikatif, yang dilaksanakan langsung oleh Sekretariat Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Gambaran tentang hubungan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1
Hubungan Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam Penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 terdiri dari :

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud Dan Tujuan
- D. Hubungan Rencana Strategis dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- E. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN

- A. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi
- B. Sumber Daya SKPD
 - 1. Sumber Daya Manusia
 - 2. Sarana dan Prasarana
- C. Kinerja Pelayanan SKPD
- D. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD
- B. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- C. Telaah Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
- D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- A. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- A. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019-2024

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

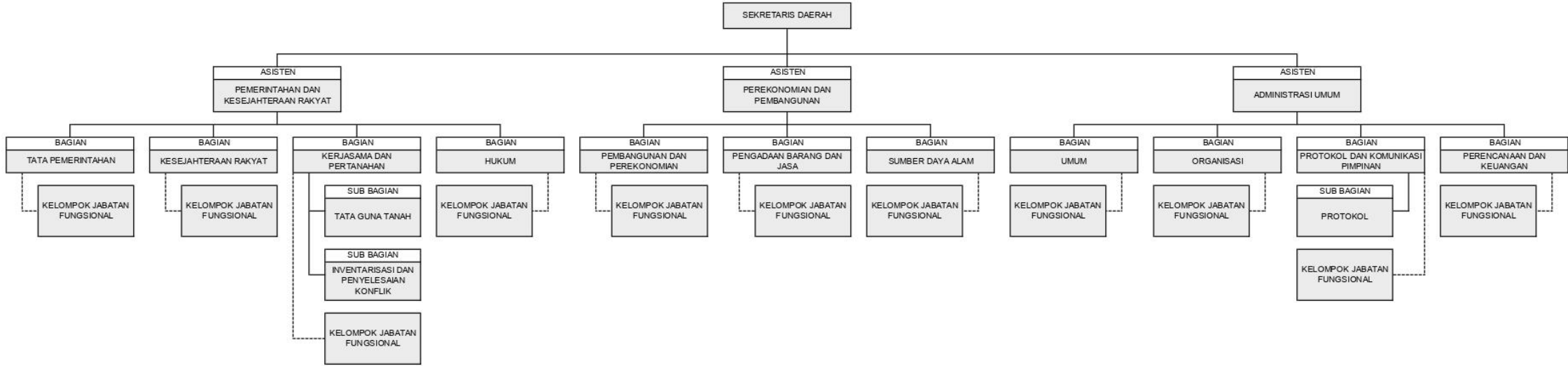
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya, yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mempawah. Tujuan utama pemekaran Kabupaten ini adalah agar kesejahteraan masyarakat dapat cepat terwujud dengan memperlancar pelayanan terhadap masyarakat dengan mendekatkan pusat kekuasaan pada wilayah-wilayah yang melingkupi kabupaten ini. Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya merupakan perangkat daerah melaksanakan kewenangan otonomi dalam rangka pelaksanaan tugas yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka penyesuaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, maka Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 dirubah kedalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 107 Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019 dan dirubah kembali dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021 akibat dari Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 107 Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019 yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah, dengan tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah, asisten dan staf ahli serta pelayanan administratif.

Adapun Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



Sumber : Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya

Sekretaris Daerah dibantu 3 (tiga) asisten, yaitu :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 4 (empat) Bagian, yaitu :

- a. Bagian Tata Pemerintahan
- b. Bagian Hukum
- c. Bagian Kerjasama dan Pertanahan dengan 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Tata Guna Tanah
 - 2) Sub Bagian Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik
- d. Bagian Kesejahteraan Rakyat

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi 3 (tiga) Bagian, yaitu :

1. Bagian Pembangunan dan Perekonomian
2. Bagian Sumber Daya Alam
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

3. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum membawahi 4 (empat) Bagian, yaitu :

- a. Bagian Organisasi
- b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan 1 (satu) Sub Bagian, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Protokol
- c. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- d. Bagian Umum

Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

a. SEKRETARIS DAERAH

Tugas Pokok

Sekretaris Daerah adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan serta melaporkan kegiatan Sekretariat Daerah berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Asisten dan Staf Ahli;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah;
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tugas pokok

Membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas koordinasi, perumusan, pembinaan, pengarahan, penyelenggaraan dan evaluasi kebijakan daerah di Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum serta Bagian Kerjasama dan Pertanahan.

Fungsi

- a. Penyusunan kebijakan daerah di Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum serta Kerjasama dan Pertanahan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum serta Kerjasama dan Pertanahan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas SKPD di Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum serta Kerjasama dan Pertanahan;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum serta Kerjasama dan Pertanahan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum serta Kerjasama dan Pertanahan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum serta kerjasama dan pertanahan.

c. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Tugas Pokok

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan serta otonomi daerah.

Fungsi

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Tata Pemerintahan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Tata Pemerintahan sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan serta otonomi daerah;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendali kegiatan di Bagian Tata Pemerintahan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Tata Pemerintahan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. BAGIAN HUKUM

Tugas Pokok

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.

Fungsi

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Hukum;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Hukum sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Hukum;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Hukum; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. BAGIAN KERJASAMA DAN PERTANAHAN

Tugas Pokok

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas kerjasama dalam negeri, luar negeri dan evaluasi, tata guna tanah serta inventarisasi dan penyelesaian konflik.

Fungsi

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Kerjasama dan Pertanahan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Kerjasama dan Pertanahan sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Kerjasama dalam negeri, luar negeri dan evaluasi, tata guna tanah serta inventarisasi dan penyelesaian konflik;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Kerjasama dan Pertanahan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Kerjasama dan Pertanahan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tugas Pokok

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Tugas Pokok

Membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas koordinasi, perumusan, pembinaan, pengarahan, penyelenggaraan dan evaluasi kebijakan daerah di Bagian Pembangunan dan Perekonomian, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Bagian Sumber Daya Alam.

Fungsi

- a. Penyusunan kebijakan daerah di Bagian Pembangunan dan Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa serta Sumber Daya Alam;
- b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di Bagian Pembangunan dan Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa serta Sumber Daya Alam;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas SKPD di Bagian Pembangunan dan Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa serta Sumber Daya Alam;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bagian Pembangunan dan Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa serta Sumber Daya Alam;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di Bagian Pembangunan dan Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa serta Sumber Daya Alam; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang pembangunan dan perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya.

h. BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN

Tugas Pokok

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang administrasi pembangunan, pembinaan BUMD, BLUD, perencanaan dan pengawasan usaha mikro, serta pengendalian dan distribusi perekonomian.

Fungsi

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Pembangunan dan Perekonomian;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Pembangunan dan Perekonomian sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan, pembinaan BUMD, BLUD, perencanaan dan pengawasan usaha mikro, serta pengendalian dan distribusi perekonomian;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Pembangunan dan Perekonomian;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Pembangunan dan Perekonomian; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i. BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

Tugas Pokok

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam energi dan air.

Fungsi

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Sumber Daya Alam;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Sumber Daya Alam sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam energi dan air;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Sumber Daya Alam;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Sumber Daya Alam; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

j. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Tugas Pokok

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan LPSE, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Fungsi

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan LPSE, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Tugas Pokok

Membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas koordinasi, perumusan, pembinaan, pengarahan, penyelenggaraan dan evaluasi kebijakan daerah di Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Fungsi

- a. Penyusunan kebijakan daerah di Bagian Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Perencanaan dan Keuangan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di Bagian Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Perencanaan dan Keuangan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas SKPD di Bagian Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Perencanaan dan Keuangan;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bagian Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Perencanaan dan Keuangan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di Bagian Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Perencanaan dan Keuangan; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan yang berkaitan dengan tugasnya.

I. BAGIAN ORGANISASI

Tugas Pokok

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.

Fungsi

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Organisasi;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Organisasi sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Organisasi;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Organisasi; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

m. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Tugas Pokok

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan.

Fungsi

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang protocol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

n. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Tugas Pokok

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Fungsi

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

o. BAGIAN UMUM

Tugas Pokok

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Fungsi

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Umum;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan, pengendalian dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Umum sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Umum;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Umum; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

p. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan teknis berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu yang dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

B. SUMBER DAYA SKPD

1. Sumber Daya Manusia

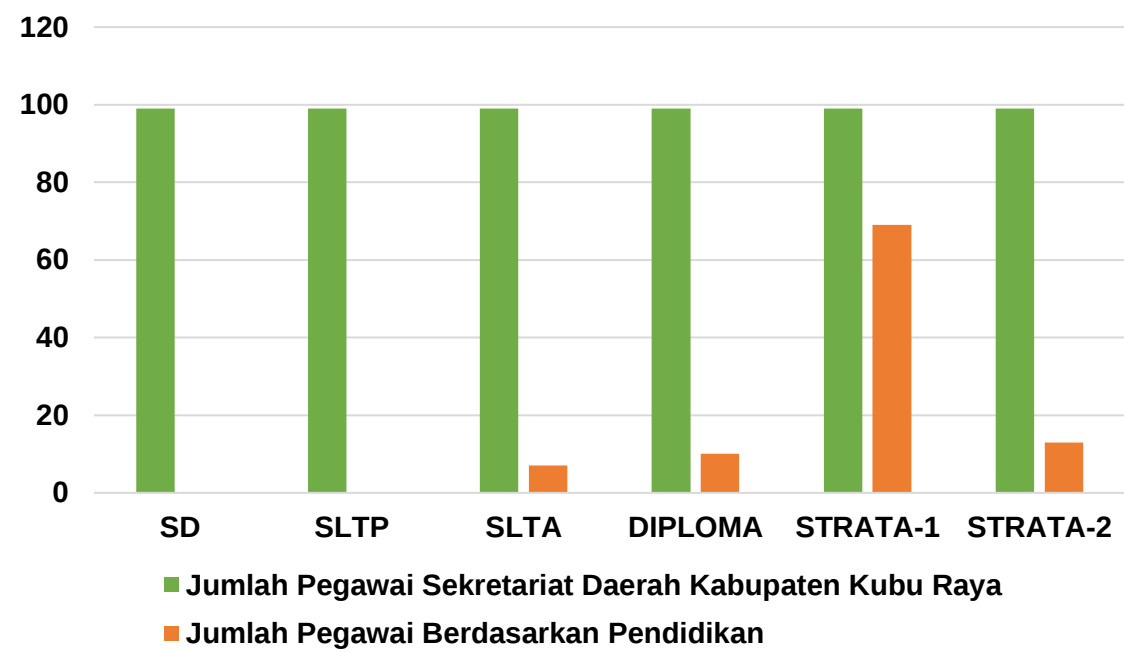
Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ada. Dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tepat, maka sumber daya manusia tersebut dapat melaksanakan tugas, pokok dan fungsi serta bertanggung jawab sehingga menghasilkan keluaran yang berkualitas dan sangat memuaskan juga. Berikut disampaikan data terkait sumber daya aparatur di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat / golongan, eselon, dan berdasarkan jenis kelamin dari masing-masing perangkat di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Perangkat	Pendidikan				Jumlah
		SLTA	Diploma	S-1	S-2	
1	Sekretaris Daerah	-	-	-	1	1
2	Asisten I, II, dan III	-	-	-	2	2
3	Staf Ahli Bupati	-	-	-	1	1
4	Bagian Tata Pemerintahan	-	-	8	-	8
5	Bagian Hukum	-	1	7	-	8
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	-	5	-	6
7	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	-	-	8	-	8
8	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	1	-	4	1	6
9	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	12	1	13
10	Bagian Sumber Daya Alam	-	-	3	2	5
11	Bagian Umum	3	2	3	2	10
12	Bagian Organisasi	1	-	6	2	9
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	2	8	-	11
14	Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	5	5	1	11
	Jumlah	7	10	69	13	99

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya per 31 Desember 2021

Gambar 2.2
Grafik Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan Tabel 2.1 dan Gambar 2.2 diatas, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan Sumber Daya Aparatur di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2021 adalah Sarjana tingkat Strata 1 (S-1) sebanyak 69 orang atau 69,69%, Strata 2 (S-2) sebanyak 13 orang yaitu 13,13%. Jadi secara umum sumber daya aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan sudah sangat baik.

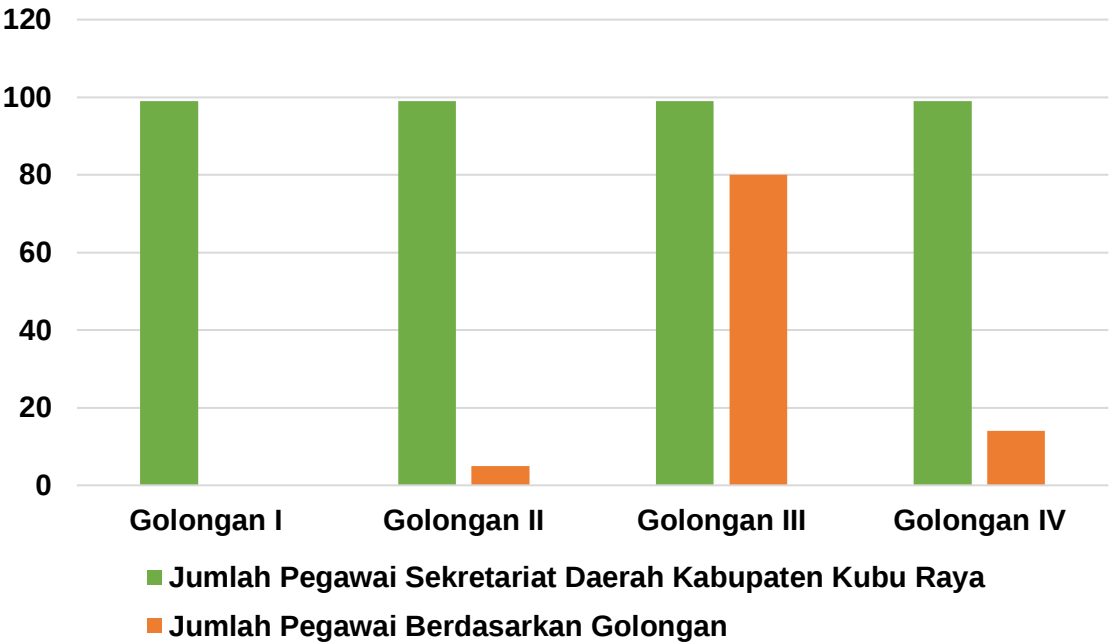
Tabel 2.2
Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan Pangkat / Golongan

No	Perangkat	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretaris Daerah	-	-	-	1	1
2	Asisten I, II, dan III	-	-	-	2	2
3	Staf Ahli Bupati	-	-	-	1	1
4	Bagian Tata Pemerintahan	-	-	7	1	8
5	Bagian Hukum	-	-	7	1	8
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	1	4	1	6
7	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	-	-	7	1	8
8	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	-	-	5	1	6
9	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	13	-	13
10	Bagian Sumber Daya Alam	-	-	4	1	5
11	Bagian Umum	-	3	6	1	10
12	Bagian Organisasi	-	-	8	1	9

13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	10	1	11
14	Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	1	9	1	11
	Jumlah	-	5	80	14	99

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya per 31 Desember 2021

Gambar 2.3
Grafik Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Pangkat / Golongan



Berdasarkan Tabel 2.2 dan Gambar 2.3 tersebut diketahui bahwa secara umum sumber daya aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2021 berdasarkan pangkat / golongan sudah sangat baik, dimana dengan kondisi saat ini akan sangat memudahkan dalam regenerasi jabatan.

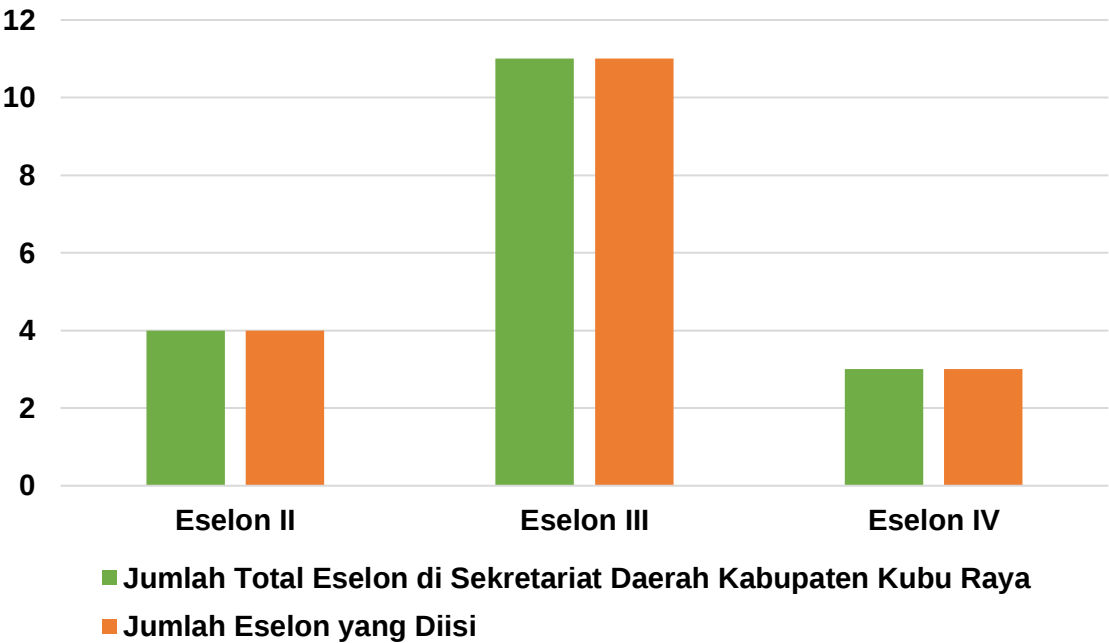
Tabel 2.3
Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Eselon

No	Perangkat	Eselon			Jumlah
		IV	III	II	
1	Sekretaris Daerah	-	-	1	1
2	Asisten I, II, dan III	-	-	2	2
3	Staf Ahli Bupati	-	-	1	1
4	Bagian Tata Pemerintahan	-	1	-	1
5	Bagian Hukum	-	1	-	1
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	1	-	1
7	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	2	1	-	3
8	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	-	1	-	1
9	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	1	-	1

10	Bagian Sumber Daya Alam	-	1	-	1
11	Bagian Umum	-	1	-	1
12	Bagian Organisasi	-	1	-	1
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	1	-	2
14	Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	1	-	1
	Jumlah	3	11	4	18

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021

Gambar 2.4
Grafik Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Eselon



Berdasarkan Tabel 2.3 dan Gambar 2.4 tersebut diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat kekosongan jabatan pada eselon III.b, adapun kekosongan terdapat pada jabatan Asisten Administrasi Umum dikarenakan telah mencapai masa Purna Tugas dan sementara diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 107 Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019, susunan struktural di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya memiliki 1 (satu) jabatan eselon II.a yaitu pada jabatan Sekretaris Daerah, 3 (tiga) jabatan eselon II.b pada jabatan Asisten Sekretaris Daerah, 11 (sebelas) jabatan eselon III.a pada jabatan Kepala Bagian, dan 3 (tiga) jabatan eselon IV.a pada jabatan Kepala Sub Bagian.

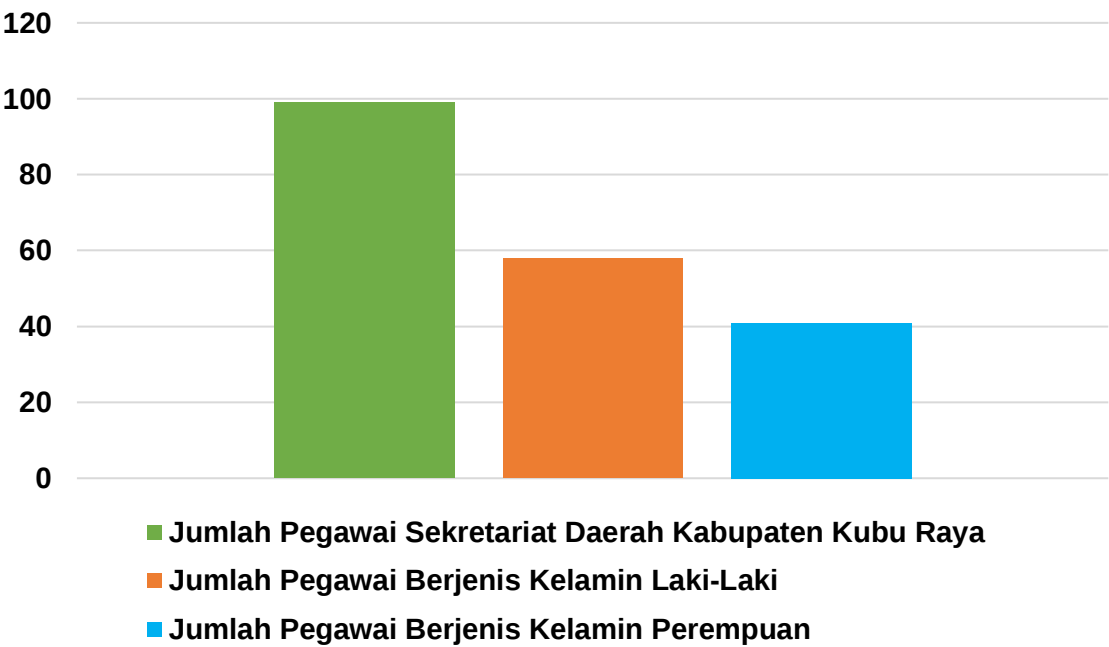
Tabel 2.4
Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Perangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Sekretaris Daerah	1	-	1
2	Asisten I, II, dan III	2	-	2

3	Staf Ahli Bupati	1	-	1
4	Bagian Tata Pemerintahan	7	1	8
5	Bagian Hukum	3	5	8
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5	1	6
7	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	5	3	8
8	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	3	3	6
9	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	7	6	13
10	Bagian Sumber Daya Alam	2	3	5
11	Bagian Umum	5	5	10
12	Bagian Organisasi	5	4	9
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7	4	11
14	Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	6	11
	Jumlah	58	41	99

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021

Gambar 2.5
Grafik Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan Tabel 2.4 dan Gambar 2.4 dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya telah menerapkan kesetaraan gender sehingga perbedaaan jumlah jenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh berbeda. Dengan jumlah laki-laki sebanyak 58 orang dengan persentase sebesar 58,59% dan perempuan sebanyak 41 orang dengan persentase sebesar 41,41%.

2. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya secara umum belum tercukupi secara maksimal. Untuk mengatasinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya berusaha melakukan penambahan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap mengingat kemampuan anggaran yang terbatas, dimana penambahan-penambahan tersebut disesuaikan dengan standar kualitas yang dibutuhkan. Disamping itu pemeliharaan secara rutin dan berkala juga dilakukan agar sarana dan prasarana tetap dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya dalam upaya menunjang pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien.

C. KINERJA PELAYANAN SKPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 107 Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dipahami bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis serta menyelenggarakan tugas pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan lingkup tugas, yang dapat dibagi kedalam 3 (tiga) peran utama yaitu :

1. Pelayanan Sebagai Pengambil Kebijakan

Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan yang ditangani Sekretariat Daerah merupakan unit kerja penentu dalam menyusun dan merumuskan kebijakan pembangunan daerah, administrasi pemerintahan, kemasyarakatan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana / prasarana pemerintah daerah yang diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

2. Pelayanan Sebagai Koordinator Pembangunan Daerah

Pelayanan sebagai koordinator perumusan kebijakan pembangunan daerah, Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai peran koordinatif yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

3. Pelayanan Administrasi

Sekretariat Daerah melakukan kajian, telaahan, evaluasi kebijakan, serta penyediaan data dan informasi sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan pelayanan administratif kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Periode Rencana Strategis Tahun 2014-2019

No	Indikator Kinerja Seusia Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun ke-					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Periode Rencana Strategis Tahun 2014-2019

No	Uraian Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-Rata Pertumbuhan		
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	815.015.000,00	-	-	-	-	-	791.264.900,00	-	-	-	-	-	97%	-	-	-	-	-	815.015.000,00	791.264.900,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	1.152.120.000,00	821.390.000,00	1.364.120.000,00	1.364.120.000,00	762.440.000,00	1.018.400.000,00	623.816.923,00	676.423.023,00	723.245.267,00	828.814.813,00	730.640.631,00	883.822.728,00	54%	82%	53%	61%	96%	87%	6.482.590.000,00	4.466.763.385,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	121.850.000,00	-	-	-	-	-	31.450.000,00	-	-	-	-	-	-	26%	-	-	121.850.000,00	31.450.000,00	
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS / DPRD / Kepala Daerah	45.000.000,00	-	-	-	-	-	9.349.200,00	-	-	-	-	-	21%	-	-	-	-	-	45.000.000,00	9.349.200,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	50.000.000,00	70.000.000,00	20.954.100,00	32.500.000,00	37.000.000,00	35.000.000,00	12.849.800,00	13.392.100,00	17.237.600,00	21.183.000,00	36.246.000,00	18.901.500,00	26%	19%	82%	65%	98%	54%	245.454.100,00	119.810.000,00	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	30.000.000,00	18.000.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	30.000.000,00	18.000.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	104.400.000,00	104.400.000,00	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	254.265.000,00	229.290.000,00	327.540.000,00	334.400.000,00	356.000.000,00	437.600.000,00	252.530.000,00	226.653.000,00	327.540.000,00	334.344.500,00	355.967.000,00	374.663.000,00	99%	99%	100%	100%	100%	86%	1.939.095.000,00	1.871.697.500,00	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	164.219.800,00	96.000.000,00	64.035.500,00	76.501.500,00	96.501.500,00	96.691.800,00	146.914.700,00	91.148.300,00	61.647.700,00	75.688.300,00	91.477.500,00	96.642.600,00	89%	95%	96%	99%	95%	100%	593.950.100,00	563.519.100,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	120.000.000,00	89.860.000,00	75.813.000,00	65.620.000,00	65.620.000,00	65.620.000,00	98.373.000,00	89.128.750,00	75.145.500,00	65.620.000,00	65.620.000,00	65.239.900,00	82%	99%	99%	100%	100%	99%	482.533.000,00	459.127.150,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	97.880.000,00	60.000.000,00	72.100.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	68.745.000,00	29.835.000,00	72.100.000,00	59.980.500,00	59.016.500,00	54.668.000,00	70%	50%	100%	100%	98%	91%	409.980.000,00	344.445.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	160.000.000,00	200.000.000,00	220.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	99.932.000,00	131.724.200,00	199.904.000,00	213.086.000,00	128.049.000,00	199.969.000,00	100%	82%	100%	97%	64%	100%	1.080.000.000,00	972.664.200,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	77.912.000,00	29.472.000,00	14.940.000,00	79.920.000,00	79.920.000,00	79.920.000,00	57.171.300,00	29.472.000,00	14.940.000,00	79.920.000,00	79.920.000,00	79.920.000,00	73%	100%	100%	100%	100%	100%	362.084.000,00	341.343.300,00	
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	1.508.000.000,00	1.750.000.000,00	1.855.000.000,00	1.955.500.000,00	1.785.750.000,00	2.290.500.000,00	1.011.579.000,00	1.664.260.250,00	1.790.235.400,00	1.891.305.000,00	1.318.797.000,00	2.200.373.000,00	67%	95%	97%	97%	74%	96%	11.144.750.000,00	8.876.549.650,00	
	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1.356.169.400,00	1.397.705.000,00	1.201.982.912,00	1.026.812.000,00	1.101.046.000,00	801.046.000,00	1.277.740.800,00	1.186.733.071,00	1.176.410.218,00	1.009.936.200,00	1.099.938.100,00	801.046.000,00	94%	85%	98%	98%	100%	100%	6.884.761.312,00	6.551.804.389,00	
	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	200.000.000,00	318.525.000,00	319.254.350,00	520.000.000,00	385.700.000,00	335.700.000,00	159.052.000,00	317.580.000,00	317.975.500,00	519.469.000,00	384.807.500,00	334.175.000,00	80%	100%	100%	100%	100%	100%	2.079.179.350,00	2.033.059.000,00	
	Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan Asisten Pemerintahan	97.845.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	86.117.800,00	93.782.010,00	149.778.997,00	99.727.500,00	146.780.500,00	149.616.500,00	88%	94%	100%	100%	98%	100%	747.845.000,00	725.803.307,00	
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	-	-	7.739.750,00	6.998.300,00	-	-	-	-	4.734.750,00	6.698.300,00	-	-	-	-	61%	96%	-	-	14.738.050,00	11.433.050,00	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																					
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	553.310.000,00	-	1.795.405.000,00	271.800.000,00	-	5.768.000.000,00	551.325.000,00	-	1.687.686.500,00	271.800.000,00	-	4.607.158.000,00	100%	-	94%	100%	-	-	8.388.515.000,00	7.117.969.500,00	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	640.000.000,00	1.995.382.000,00	273.950.000,00	1.478.910.000,00	139.500.000,00	-	516.528.900,00	1.807.826.200,00	254.250.000,00	1.239.365.560,00	113.732.000,00	-	81%	91%	93%	84%	82%	-	4.527.742.000,00	3.931.702.660,00	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	382.800.000,00	609.000.000,00	273.664.286,00	93.965.000,00	914.100.000,00	492.700.000,00	174.810.000,00	583.467.800,00	204.997.050,00	92.114.000,00	781.659.000,00	396.928.000,00	46%	96%	75%	98%	-	81%	2.766.229.286,00	2.233.975.850,00	
	Pengadaan Meubelur	657.900.000,00	168.760.000,00	303.710.000,00	340.400.000,00	140.200.000,00	241.500.000,00	608.600.000,00	168.206.000,00	303.610.000,00	340.400.000,00	134.174.000,00	233.788.593,00	93%	100%	100%	100%	-	97%	1.852.470.000,00	1.788.778.593,00	
	Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat	-	-	170.000.000,00	80.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	-	-	84.700.000,00	62.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	-	-	50%	77%	79%	79%	291.200.000,00	179.300.000,00	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	320.000.000,00	554.250.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00	432.000.000,00	50.000.000,00	298.185.270,00	293.601.000,00	16.882.000,00	29.326.500,00	412.083.000,00	47.175.000,00	93%	53%	84%	59%	95%	94%	1.426.250.000,00	1.097.252.770,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	767.320.000,00	791.870.000,00	777.280.000,00	1.284.800.000,00	1.299.000.000,00	1.188.000.000,00	700.752.000,00	724.114.200,00	734.791.400,00	1.128.695.500,00	831.718.857,00	866.461.650,00	91%	91%	95%	88%	64%	73%	6.108.270.000,00	4.986.533.607,00	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	96.300.000,00	128.440.000,00	211.108.000,00	216.784.000,00	350.000.000,00	334.000.000,00	92.352.000,00	67.003.000,00	198.701.000,00	168.002.000,00	248.206.000,00	202.712.400,00	96%	52%	94%	77%	71%	61%	1.336.632.000,00	976.976.400,00	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer	41.490.000,00	36.100.000,00	36.100.000,00	28.400.000,00	18.400.000,00	30.000.000,00	41.490.000,00	36.100.000,00	30.688.000,00	27.660.000,00	18.250.000,00	25.700.000,00	100%	100%	85%	97%	99%	86%	190.490.000,00	179.888.000,00	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Studio dan Komunikasi	30.000.000,00	20.000.000,00	49.416.000,00	-	-	-	29.991.000,00	19.944.000,00	49.416.000,00	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	99.416.000,00	99.351.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	9.259.000,00	-	-	-	-	-	9.259.000,00	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	9.259.000,00	9.259.000,00	
	Monitoring dan Evaluasi Radio SSB dan 2 Meter Band	-	12.000.000,00	4.044.000,00	-	50.000.000,00	44.540.000,00	-	9.930.000,00	4.044.000,00	-	49.940.000,00	43.543.000,00	-	83%	100%	-	100%	98%	110.584.000,00	107.457.000,00	
	Bimbingan Teknis Persandian dan Komunikasi	10.000.000,00	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																					
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	77.000.000,00	134.300.000,00	-	-	-	-	75.830.000,00	127.030.000,00	-	-	-	-	98%	95%	-	-	-	-	211.300.000,00	202.860.000,00	
	Peringatan Hari Besar Nasional	181.561.500,00	-	-	-	-	-	89.650.000,00	-	-	-	-	-	49%	-	-	-	-	-	181.561.500,00	89.650.000,00	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																					
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	75.059.200,00	61.068.675,00	123.260.000,00	182.757.500,00	211.295.000,00	259.475.000,00	75.059.200,00	60.302.134,00	119.874.230,00	178.851.100,00	208.207.850,00	259.201.350,00	100%	99%	97%	98%	99%	100%	912.915.375,00	901.495.864,00	
	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	-	-	-	9.998.500,00	-	-	-	-	-	9.998.500,00	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	9.998.500,00	9.998.500,00
	Facilitasi kegiatan KORPRI Kabupaten Kubu Raya	52.950.000,00	68.115.000,00	-	-	-	-	38.300.000,00	66.539.000,00	-	-	-	-	72%	98%	-	-	-	-	121.065.000,00	104.839.000,00	
	Penyusunan Analisis Jabatan SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bimbingan Teknis Operator Radio Sekabupaten Kubu Raya	-	52.400.000,00	-	-	-	-	-	51.371.800,00	-	-	-	-	-	-	98%	-	-	-	-	52.400.000,00	51.371.800,00

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN III
(RPJMD-P KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024)

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

	Bimbingan Teknis Persandian dan Komunikasi	-	12.000.000,00	55.500.000,00	-	-	-	-	12.000.000,00	55.487.147,00	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	67.500.000,00	67.487.147,00
	Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Bupati	95.455.000,00	95.000.000,00	77.400.000,00	71.960.000,00	112.620.000,00	162.620.000,00	51.515.600,00	92.664.604,00	77.282.744,00	71.647.300,00	112.494.175,00	162.195.000,00	54%	98%	100%	100%	100%	100%	615.055.000,00	567.799.423,00
	Penyediaan Akses Media RABX	-	50.610.000,00	-	-	-	-	-	50.303.000,00	-	-	-	-	-	99%	-	-	-	-	50.610.000,00	50.303.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-	21.250.000,00	42.573.000,00	125.100.000,00	151.701.200,00	-	-	21.250.000,00	42.393.000,00	124.260.000,00	150.711.200,00	-	-	100%	100%	99%	99%	340.624.200,00	338.614.200,00
	Penyusunan Analisis Jabatan Pemerintah Kab. Kubu Raya	-	-	-	51.183.800,00	-	-	-	-	-	51.183.700,00	-	-	-	-	-	100%	-	-	51.183.800,00	51.183.700,00
	Workshop Implementasi Proses Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-	79.728.500,00	49.441.600,00	-	-	-	-	73.056.300,00	49.405.600,00	-	-	-	-	92%	100%	129.170.100,00	122.461.900,00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																				
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	15.255.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	14.655.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	96%	100%	-	-	-	-	25.255.000,00	24.655.000,00
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	20.100.000,00	20.194.400,00	10.000.000,00	4.999.000,00	4.999.000,00	4.750.000,00	20.100.000,00	16.991.400,00	10.000.000,00	4.999.000,00	4.729.000,00	670.000,00	100%	84%	100%	100%	95%	14%	65.042.400,00	57.489.400,00
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	30.000.000,00	25.000.000,00	14.365.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.680.000,00	29.896.000,00	24.900.000,00	14.365.000,00	10.000.000,00	9.352.000,00	5.389.000,00	100%	100%	100%	100%	94%	95%	95.045.000,00	93.902.000,00
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah SKPD	12.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	11.798.000,00	9.987.000,00	-	-	-	-	98%	100%	-	-	-	-	22.000.000,00	21.785.000,00
	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	13.993.000,00	-	-	-	-	-	9.993.000,00	-	-	-	-	-	71%	-	-	-	-	-	13.993.000,00	9.993.000,00
	Penyusunan Rencana Strategi SKPD	35.516.200,00	-	-	-	-	-	30.609.700,00	-	-	-	-	-	86%	-	-	-	-	-	35.516.200,00	30.609.700,00
	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	-	20.027.900,00	15.950.000,00	17.967.500,00	17.967.500,00	8.870.000,00	-	20.022.900,00	15.928.500,00	17.967.500,00	17.364.500,00	8.696.000,00	-	100%	100%	100%	97%	98%	80.782.900,00	79.979.400,00
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah SKPD	-	17.028.000,00	11.910.000,00	9.999.000,00	9.999.000,00	3.430.000,00	-	16.448.000,00	11.910.000,00	9.999.000,00	9.864.000,00	3.124.000,00	-	97%	100%	100%	99%	91%	52.366.000,00	51.345.000,00
	Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	-	45.604.000,00	-	-	-	-	-	41.314.300,00	-	-	-	-	-	91%	-	-	-	-	45.604.000,00	41.314.300,00
	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	-	17.969.725,00	5.373.900,00	-	-	-	-	9.500.000,00	4.861.900,00	-	-	-	-	53%	90%	-	-	-	23.343.625,00	14.361.900,00
	Facilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	-	44.473.000,00	-	40.000.000,00	-	-	-	40.734.000,00	-	39.453.000,00	-	-	-	92%	-	99%	-	-	84.473.000,00	80.187.000,00
	Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan SKPD	-	-	11.000.000,00	9.997.000,00	9.997.000,00	2.920.000,00	-	-	11.000.000,00	9.507.000,00	9.160.000,00	2.869.000,00	-	-	100%	95%	92%	98%	33.914.000,00	32.536.000,00
	Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Kabupaten	-	-	45.649.000,00	56.176.000,00	227.958.000,00	184.393.900,00	-	-	45.649.000,00	53.551.000,00	226.961.400,00	181.928.000,00	-	-	100%	95%	100%	99%	514.176.900,00	508.089.400,00
6	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah																				
	Sistem Informasi Tanah Aset Pemerintah	-	90.900.000,00	-	-	-	-	-	88.700.000,00	-	-	-	-	-	98%	-	-	-	-	90.900.000,00	88.700.000,00
7	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat																				
	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat, Lantai Jemur dan atau Penyediaan Sarana Pendukungnya	69.103.300,00	-	-	-	-	-	69.103.300,00	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	69.103.300,00	69.103.300,00
8	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perikanan																				
	Penyusunan Data Base Kelompok Wanita Tani (KWT) melalui OPP dengan Konsor KRP	15.834.000,00	7.560.500,00	-	-	-	-	15.834.000,00	7.560.500,00	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	23.394.500,00	23.394.500,00
	Rapat Koordinasi Evaluasi DEMAPAN, P2KP dan Daerah Rawan Pangan	120.453.800,00	41.709.500,00	25.940.250,00	-	-	-	120.453.800,00	39.217.500,00	25.940.250,00	-	-	-	100%	94%	100%	-	-	-	188.103.550,00	185.611.550,00
	Sosialisasi, Promosi dan Kampanye P2KP	47.786.900,00	10.991.500,00	-	-	-	-	47.786.900,00	10.442.000,00	-	-	-	-	100%	95%	-	-	-	-	58.778.400,00	58.228.900,00
	Sosialisasi dan Promosi Pangan Segar	52.544.000,00	20.081.500,00	-	-	-	-	52.544.000,00	19.407.500,00	-	-	-	-	100%	97%	-	-	-	-	72.625.500,00	71.951.500,00
	Promosi Pengolahan Pangan Lokal (MP3L)	80.344.700,00	-	8.070.950,00	-	-	-	80.344.700,00	-	8.070.950,00	-	-	-	100%	-	100%	-	-	-	88.415.650,00	88.415.650,00
	Penyusunan Data Base Kelompok Afinitas Desa Pangan (DEMAPAN) Kabupaten Kubu Raya	17.410.000,00	7.630.500,00	39.699.350,00	-	-	-	17.410.000,00	7.630.500,00	39.699.350,00	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	64.739.850,00	64.739.850,00
	Lomba Cipta Karya Menu 3B Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	99.260.000,00	44.032.500,00	68.928.450,00	-	-	-	99.260.000,00	42.832.500,00	67.554.450,00	-	-	-	100%	97%	98%	-	-	-	212.220.950,00	209.646.950,00
	Penyusunan Nersca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH)	18.428.500,00	-	17.846.000,00	-	-	-	15.828.500,00	-	16.836.000,00	-	-	-	86%	-	94%	-	-	-	36.274.500,00	32.664.500,00
	Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten dan Pusat	123.184.000,00	39.937.500,00	24.160.700,00	-	-	-	115.919.000,00	35.868.900,00	24.062.700,00	-	-	-	94%	90%	100%	-	-	-	187.282.200,00	175.850.600,00
	Pengembangan Penggerakragaman Konsumsi Pangan Dan Keamanan Pangan Segar	18.716.000,00	-	-	-	-	-	18.716.000,00	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	18.716.000,00	18.716.000,00
	Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan Kabupaten Kubu Raya	12.475.000,00	-	-	-	-	-	12.425.000,00	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	12.475.000,00	12.425.000,00
	Penyusunan Data Base Gapoktan (Kelompok Tani, Kelompok Afinitas) Kabupaten Kubu Raya	7.284.000,00	-	-	-	-	-	7.284.000,00	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	7.284.000,00	7.284.000,00
	Sosialisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	-	19.949.000,00	15.531.500,00	-	-	-	-	15.584.000,00	12.646.500,00	-	-	-	-	78%	81%	-	-	-	35.480.500,00	28.230.500,00
	Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Program Pengembangan Ketahanan Pangan Bidang Rawan Pangan Mandiri	11.066.500,00	-	-	-	-	-	10.963.500,00	-	-	-	-	-	99%	-	-	-	-	-	11.066.500,00	10.963.500,00
	Penyelenggaraan Peningatan HKP, HPS, dan PKK Ts. Beringin	-	461.697.000,00	-	-	-	-	-	444.746.900,00	-	-	-	-	-	96%	-	-	-	-	461.697.000,00	444.746.900,00
	Pembinaan dan Pengawasan Raskin (Beras Miskin) Kabupaten Kubu Raya	48.342.000,00	30.003.500,00	33.486.400,00	65.608.500,00	65.608.500,00	-	40.189.400,00	29.446.500,00	30.526.400,00	62.995.200,00	62.808.050,00	-	83%	98%	91%	96%	96%	-	243.048.900,00	225.965.550,00
	Rapat Koordinasi Evaluasi PLDPM Kab. Kubu Raya	78.869.600,00	-	-	-	-	-	73.560.100,00	-	-	-	-	-	93%	-	-	-	-	-	78.869.600,00	73.560.100,00

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN III
(RPJMD-P KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024)**

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

	Monitoring Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	-	-	14.093.150,00	-	-	-	-	-	14.093.150,00	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	14.093.150,00	14.093.150,00	
	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM)	-	-	53.105.900,00	-	-	-	-	-	50.990.900,00	-	-	-	-	-	96%	-	-	-	53.105.900,00	50.990.900,00	
9	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi																					
	Peningkatan Sarana Komunikasi Data Melalui Radio SSB/2 Mtr Band	51.386.500,00	-	-	-	-	-	3.046.500,00	-	-	-	-	-	6%	-	-	-	-	-	51.386.500,00	3.046.500,00	
10	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan																					
	Facilitas, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	85.000.000,00	90.000.000,00	-	-	-	84.043.200,00	85.431.000,00	-	-	-	-	99%	95%	175.000.000,00	169.474.200,00		
11	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																					
	Facilitasi Kegiatan Pameran / Expo	3.878.000,00	24.100.000,00	29.321.500,00	39.371.500,00	39.371.500,00	39.371.500,00	3.878.000,00	19.313.375,00	29.321.500,00	39.371.500,00	37.421.500,00	39.204.300,00	100%	80%	100%	100%	95%	100%	175.414.000,00	168.510.175,00	
	Peninjau Penyelenggaraan Pameran / Expo	23.042.000,00	-	-	-	-	-	23.015.000,00	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	23.042.000,00	23.015.000,00	
12	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial																					
	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	-	130.000.000,00	147.113.400,00	147.113.400,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-	123.710.400,00	146.624.148,00	146.986.750,00	149.269.100,00	149.896.750,00	-	95%	100%	100%	100%	100%	724.226.800,00	716.487.148,00	
	Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	-	75.000.000,00	22.237.500,00	-	-	-	-	74.223.350,00	21.685.000,00	-	-	-	-	99%	98%	-	-	-	97.237.500,00	95.908.350,00	
13	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah																					
	Sertifikasi Tanah Masyarakat (PRODA)	38.980.000,00	20.630.000,00	73.345.500,00	16.818.500,00	146.475.000,00	41.310.800,00	498.000,00	15.594.000,00	58.507.500,00	16.818.500,00	136.852.850,00	41.310.800,00	1%	76%	80%	100%	93%	100%	337.559.800,00	269.581.650,00	
	Sertifikasi Tanah Pemerintah	114.510.000,00	124.040.000,00	84.128.500,00	229.542.000,00	148.060.000,00	376.534.800,00	60.233.640,00	118.396.060,00	83.911.300,00	194.117.960,00	141.104.000,00	330.646.700,00	53%	95%	100%	85%	95%	88%	1.076.815.300,00	928.409.660,00	
	Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Pemerintah dan Kepentingan Umum	17.726.600,00	3.003.000.000,00	6.400.006.020,00	6.532.400.000,00	8.960.000.000,00	3.287.340.000,00	12.931.100,00	89.174.000,00	6.399.000.000,00	6.474.000.000,00	8.496.727.200,00	3.201.249.325,00	73%	3%	100%	99%	95%	97%	28.200.472.620,00	24.673.081.625,00	
	Penyusunan dan Penetapan Harga Dasar Tanah	97.515.000,00	-	-	-	-	-	10.015.000,00	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	-	-	97.515.000,00	10.015.000,00	
	Sosialisasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	-	47.020.000,00	25.895.000,00	35.102.800,00	65.530.000,00	42.788.500,00	-	38.162.500,00	25.895.000,00	34.790.500,00	51.180.000,00	42.308.500,00	-	81%	100%	99%	78%	99%	216.336.300,00	192.336.500,00	
	Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Perubahan Penggunaan Tanah	-	179.274.872,00	123.416.935,00	-	-	-	-	158.705.303,00	123.416.935,00	-	-	-	-	89%	100%	-	-	-	302.691.807,00	282.122.238,00	
	Perencanaan Pengadaan Tanah	-	-	228.486.400,00	165.256.000,00	337.773.000,00	300.549.600,00	-	-	211.771.400,00	156.762.000,00	323.353.700,00	270.113.300,00	-	-	93%	95%	96%	90%	1.032.065.000,00	962.000.400,00	
	Persiapan Pengadaan Tanah	-	-	56.422.286,00	-	-	-	-	-	29.034.286,00	-	-	-	-	-	51%	-	-	-	-	56.422.286,00	29.034.286,00
	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	-	-	40.000.000,00	-	-	-	-	-	31.500.000,00	-	-	-	-	-	79%	-	-	-	-	40.000.000,00	31.500.000,00
	Inventarisasi dan Identifikasi Perubahan Penggunaan Tanah	-	-	1.447.150,00	-	-	-	-	-	1.447.150,00	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	1.447.150,00	1.447.150,00
14	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah																					
	Dialog Audiensi Dengan Tokoh tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	233.600.000,00	182.750.000,00	736.160.000,00	994.530.000,00	611.200.000,00	451.720.000,00	205.050.000,00	175.675.000,00	693.475.000,00	922.150.000,00	587.828.000,00	451.586.000,00	88%	96%	94%	93%	96%	100%	3.209.960.000,00	3.035.764.000,00	
	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintahan Non Departemen / Luar Negeri	186.720.000,00	288.080.000,00	228.785.000,00	230.500.000,00	400.134.500,00	389.535.000,00	56.300.000,00	277.570.000,00	149.115.000,00	212.400.000,00	256.395.500,00	358.590.000,00	30%	96%	65%	92%	64%	92%	1.723.754.500,00	1.310.370.500,00	
	Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA	39.093.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	39.093.000,00	-	
	Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	173.710.000,00	265.770.000,00	194.924.000,00	171.000.000,00	-	386.375.000,00	128.500.000,00	257.885.000,00	153.115.000,00	108.935.000,00	-	385.666.400,00	74%	97%	79%	64%	-	100%	1.191.779.000,00	1.034.101.400,00	
	Rapat Kerja Unsur Pimpinan Kecamatan	35.080.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	35.080.000,00	-	
	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	1.283.730.000,00	1.337.910.000,00	-	-	-	-	1.281.718.700,00	1.337.910.000,00	-	-	-	-	100%	100%	2.621.640.000,00	2.619.628.700,00	
	Peningkatan Pelayanan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	354.775.000,00	394.775.000,00	-	-	-	-	346.490.000,00	394.670.000,00	-	-	-	-	98%	100%	749.550.000,00	741.160.000,00	
15	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah																					
	Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah	59.408.600,00	10.000.000,00	7.353.000,00	5.797.300,00	5.797.300,00	-	56.817.600,00	7.756.000,00	7.338.000,00	5.797.300,00	4.680.000,00	-	96%	78%	100%	100%	81%	-	88.356.200,00	82.388.900,00	
16	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																					
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	-	-	42.000.000,00	56.680.000,00	94.400.000,00	84.875.000,00	-	-	41.938.000,00	56.056.800,00	92.833.000,00	84.515.600,00	-	-	100%	99%	-	100%	277.955.000,00	275.343.400,00	
	Facilitasi Penataan Aset pada SKPD	-	-	5.002.350,00	9.998.000,00	9.998.000,00	9.997.950,00	-	-	5.001.500,00	9.773.000,00	9.998.000,00	9.037.950,00	-	-	100%	98%	100%	90%	34.996.300,00	33.810.450,00	
	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	-	-	-	-	61.266.700,00	29.601.850,00	-	-	-	-	61.008.300,00	29.444.850,00	-	-	-	-	100%	99%	90.868.550,00	90.453.150,00	
	Rapat Koordinasi Evaluasi Serapan Anggaran	-	-	-	-	77.546.800,00	70.350.000,00	-	-	-	-	66.588.100,00	69.320.200,00	-	-	-	-	86%	99%	147.896.800,00	135.908.300,00	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD (Implementasi SAP Berbasis Akruai)	55.320.000,00	-	-	-	-	-	55.320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.320.000,00	55.320.000,00	
17	Program Penyelesaian Konflik - konflik Pertanahan																					
	Facilitasi Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan	24.792.500,00	207.902.500,00	170.006.786,00	170.621.400,00	211.511.000,00	356.616.000,00	23.802.250,00	190.647.180,00	165.264.500,00	161.812.800,00	179.660.100,00	354.066.000,00	96%	92%	97%	95%	85%	99%	1.141.450.186,00	1.075.252.830,00	

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN III
(RPJMD-P KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024)

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

	Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia	69.012.600,00	-	-	-	-	-	3.386.600,00	-	-	-	-	-	5%	-	-	-	-	-	69.012.600,00	3.386.600,00
	Facilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pola Kerjasama Pemerintah dan Swasta	37.459.000,00	-	-	-	-	-	32.109.000,00	-	-	-	-	-	86%	-	-	-	-	-	37.459.000,00	32.109.000,00
	Facilitasi Kerjasama Antar Daerah / Instansi / Lembaga	-	-	33.188.800,00	319.000.000,00	116.000.000,00	73.100.000,00	-	-	32.908.800,00	312.083.500,00	114.910.000,00	72.000.200,00	-	-	99%	98%	99%	98%	541.288.800,00	531.902.500,00
	Facilitasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)	-	-	-	75.000.000,00	100.000.000,00	79.283.000,00	-	-	-	74.972.500,00	98.633.000,00	76.869.200,00	-	-	-	100%	99%	97%	254.283.000,00	250.474.700,00
	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	-	-	-	-	136.600.600,00	352.132.000,00	-	-	-	-	122.520.000,00	339.071.200,00	-	-	-	-	90%	96%	488.732.600,00	461.591.200,00
25	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan																				
	Facilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	48.371.800,00	40.000.000,00	27.378.000,00	29.983.000,00	53.454.000,00	314.675.900,00	37.551.800,00	38.810.000,00	27.378.000,00	29.583.000,00	53.429.000,00	298.502.900,00	78%	97%	100%	99%	100%	95%	513.862.700,00	485.254.700,00
	Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	158.601.000,00	206.130.000,00	146.770.000,00	215.259.000,00	288.955.000,00	269.279.500,00	117.358.800,00	165.383.800,00	141.460.000,00	212.736.900,00	282.826.800,00	263.440.700,00	74%	80%	96%	99%	98%	98%	1.284.994.500,00	1.183.207.000,00
	Pengelolaan dan Penataan Dokumentasi Dokumentasi Hukum	66.903.400,00	70.341.500,00	6.946.500,00	47.578.000,00	76.067.000,00	88.417.000,00	66.903.400,00	46.292.300,00	6.946.500,00	40.000.700,00	75.604.800,00	82.084.300,00	100%	66%	100%	84%	99%	93%	356.253.400,00	317.832.000,00
	Pengkajian produk-produk Hukum	74.950.000,00	62.050.000,00	88.277.125,00	78.097.000,00	160.181.500,00	172.916.000,00	53.571.800,00	56.320.000,00	88.277.125,00	75.949.500,00	159.971.300,00	168.153.400,00	71%	91%	100%	97%	100%	97%	636.471.625,00	602.243.125,00
	Legal Drafting	50.819.500,00	54.425.500,00	-	-	-	-	22.344.500,00	51.739.500,00	-	-	-	-	44%	95%	-	-	-	-	105.245.000,00	74.084.000,00
	Penyebarluasan Produk Hukum	31.362.500,00	33.729.500,00	21.369.000,00	28.945.000,00	10.161.000,00	23.761.000,00	24.872.500,00	23.116.000,00	21.369.000,00	28.263.000,00	10.161.000,00	22.361.000,00	79%	69%	100%	98%	100%	94%	149.328.000,00	130.142.500,00
	Pembuatan dan Penyusunan Softcopy / File Produk Hukum Daerah	19.161.000,00	14.552.000,00	-	-	-	-	12.902.000,00	7.770.000,00	-	-	-	-	67%	53%	-	-	-	-	33.713.000,00	20.672.000,00
	Keluarga Sadar Hukum	17.150.000,00	25.877.000,00	-	19.971.000,00	19.030.000,00	19.030.000,00	14.520.000,00	18.157.000,00	-	19.971.000,00	18.630.000,00	18.818.000,00	85%	70%	-	100%	98%	99%	101.058.000,00	90.096.000,00
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Klarifikasi Peraturan Daerah	10.109.500,00	47.545.500,00	30.705.500,00	54.299.000,00	54.907.500,00	65.735.900,00	3.879.500,00	23.196.100,00	28.386.890,00	47.146.600,00	54.098.100,00	65.186.900,00	38%	49%	92%	87%	99%	99%	263.302.900,00	221.894.090,00
	Sistem Informasi Hukum	-	226.157.000,00	-	-	18.564.500,00	52.979.000,00	-	207.928.100,00	-	-	18.563.600,00	52.079.000,00	-	92%	-	-	100%	98%	297.700.500,00	278.570.700,00
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa	7.800.000,00	65.380.000,00	58.063.800,00	30.718.500,00	135.246.000,00	184.525.550,00	7.800.000,00	55.218.000,00	58.063.800,00	30.508.500,00	123.726.000,00	184.260.000,00	100%	84%	100%	99%	91%	100%	481.733.850,00	459.576.300,00
	Implementasi SISKUM	-	-	23.490.000,00	26.161.000,00	-	-	-	-	23.490.000,00	26.161.000,00	-	-	-	-	100%	100%	-	-	49.651.000,00	49.651.000,00
26	Program Penataan Daerah Otonomi Baru																				
	Penataan dan Monitoring Administrasi Kecamatan	80.557.000,00	18.327.000,00	5.303.000,00	-	-	-	74.098.000,00	17.945.500,00	5.303.000,00	-	-	-	92%	98%	100%	-	-	-	104.187.000,00	97.346.500,00
	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)	59.152.000,00	-	3.969.300,00	-	-	-	12.985.500,00	-	3.969.300,00	-	-	-	22%	-	100%	-	-	-	63.121.300,00	16.954.800,00
	Pembakuan Nama Rupa-rupa Bumi	114.580.000,00	28.794.000,00	7.275.500,00	-	-	67.752.800,00	61.790.900,00	27.329.500,00	7.275.500,00	-	-	55.248.200,00	54%	95%	100%	-	-	82%	218.402.300,00	151.644.100,00
	Koordinasi Penegasan Batas Daerah	83.908.000,00	33.750.000,00	16.114.100,00	78.750.000,00	85.000.000,00	124.370.000,00	63.749.100,00	31.650.000,00	16.024.100,00	76.486.000,00	79.641.600,00	114.361.200,00	76%	94%	99%	97%	94%	92%	421.892.100,00	381.912.000,00
	Facilitasi Penegasan Batas Wilayah Kecamatan	199.996.800,00	50.635.000,00	45.537.800,00	102.820.000,00	115.000.000,00	100.000.000,00	75.639.800,00	49.303.000,00	44.587.000,00	102.277.800,00	108.560.000,00	98.165.550,00	38%	97%	98%	99%	94%	98%	613.989.600,00	478.533.150,00
	Facilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	44.398.000,00	-	-	-	-	-	11.372.500,00	-	-	-	-	-	26%	-	-	-	-	-	44.398.000,00	11.372.500,00
	Facilitasi Penyelenggaraan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	207.368.000,00	-	-	-	-	-	115.886.200,00	-	-	-	-	-	56%	-	-	-	-	-	207.368.000,00	115.886.200,00
	Facilitasi Penyelenggaraan Hari-hari Besar Daerah dan Nasional	-	110.000.000,00	106.475.000,00	190.000.000,00	183.000.000,00	178.000.000,00	-	99.775.000,00	106.475.000,00	178.574.000,00	124.767.500,00	152.292.000,00	-	91%	100%	94%	68%	86%	767.475.000,00	661.883.500,00
	Facilitasi dan Pembinaan Kecamatan	116.190.000,00	35.896.000,00	47.321.900,00	75.000.000,00	73.000.000,00	85.122.000,00	80.480.700,00	34.649.500,00	47.321.900,00	75.000.000,00	61.738.000,00	52.174.000,00	69%	97%	100%	100%	85%	61%	432.529.900,00	351.364.100,00
	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	63.279.500,00	-	-	-	-	-	44.371.500,00	-	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	-	63.279.500,00	44.371.500,00
	Facilitasi Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun (HUT) Kubu Raya	-	-	188.175.000,00	120.000.000,00	135.000.000,00	145.000.000,00	-	-	186.442.100,00	118.825.000,00	113.586.000,00	142.721.000,00	-	-	99%	99%	84%	98%	588.175.000,00	561.574.100,00
27	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kehutanan																				
	Facilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatannya	-	-	-	-	85.000.000,00	72.670.000,00	-	-	-	-	73.482.600,00	68.720.600,00	-	-	-	-	86%	95%	157.670.000,00	142.203.200,00
28	Program Penataan Kecamatan / Kelurahan																				
	Pemekaran Kecamatan	105.543.000,00	-	22.400.000,00	289.730.000,00	132.350.000,00	64.000.000,00	38.130.500,00	-	21.079.500,00	289.347.500,00	123.795.700,00	15.899.000,00	36%	-	94%	100%	94%	25%	614.023.000,00	488.252.200,00
	Pembentukan Kelurahan	46.788.000,00	-	-	126.700.000,00	160.000.000,00	120.000.000,00	26.479.000,00	-	-	125.369.000,00	77.199.200,00	101.619.550,00	57%	-	-	99%	48%	85%	453.488.000,00	330.666.750,00
29	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintahan Daerah																				
	Penyusunan Fakta Integritas	25.820.000,00	-	-	-	-	-	25.820.000,00	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	25.820.000,00	25.820.000,00
	Penyusunan Formasi Jabatan PNS	77.291.800,00	53.600.000,00	41.583.900,00	43.197.000,00	61.756.000,00	71.264.800,00	77.291.800,00	50.913.300,00	41.583.900,00	41.316.600,00	61.368.600,00	70.950.800,00	100%	95%	100%	96%	99%	100%	348.693.500,00	343.425.000,00
	Facilitasi Program Reformasi Birokrasi	70.600.000,00	63.487.500,00	52.289.400,00	-	-	-	59.018.800,00	63.027.500,00	52.289.400,00	-	-	-	84%	99%	100%	-	-	-	186.376.900,00	174.335.700,00
	Penyusunan Analisis Jabatan SKPD	18.175.000,00	-	-	-	-	-	10.175.000,00	-	-	-	-	-	56%	-	-	-	-	-	18.175.000,00	10.175.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi	31.550.000,00	100.000.000,00	122.531.413,00	141.294.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	28.635.000,00	92.323.075,00	120.725.800,00	141.172.700,00	149.348.000,00	145.320.400,00	91%	92%	99%	100%	100%	97%	695.375.413,00	677.524.975,00
	Facilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur	45.136.500,00	54.997.500,00	-	-	-	-	45.017.500,00	53.711.400,00	-	-	-	-	100%	98%	-	-	-	-	100.134.000,00	98.728.900,00

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN III
(RPJMD-P KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024)**

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

	Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan	147.347.100,00	-	-	-	-	-	147.347.100,00	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	147.347.100,00	147.347.100,00
	Penyusunan Penetapan Kinerja	58.403.100,00	29.395.000,00	-	23.351.000,00	29.125.000,00	22.843.700,00	58.403.100,00	28.553.800,00	-	23.305.500,00	29.051.400,00	22.757.400,00	100%	97%	-	100%	100%	100%	163.117.800,00	162.071.200,00
	Penataan, Monitoring dan Evaluasi SOPD Kabupaten Kubu Raya	144.594.500,00	77.620.000,00	33.421.400,00	47.000.000,00	146.728.200,00	134.603.200,00	104.274.200,00	56.620.000,00	33.421.400,00	47.000.000,00	146.312.550,00	132.598.500,00	72%	73%	100%	100%	100%	99%	583.967.300,00	520.226.650,00
	Rakortek Bidang Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Tingkat Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional	88.725.000,00	48.660.000,00	176.008.900,00	63.172.000,00	98.475.000,00	58.159.852,00	59.554.000,00	47.079.000,00	176.008.900,00	63.172.000,00	97.664.200,00	57.867.800,00	67%	97%	100%	100%	99%	99%	533.200.752,00	501.345.900,00
	Asistensi dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	33.145.800,00	-	-	-	-	-	33.145.800,00	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	33.145.800,00	33.145.800,00
	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal	56.162.400,00	-	-	-	-	-	56.162.400,00	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	56.162.400,00	56.162.400,00
	Asistensi dan Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) Kab. Kubu Raya	88.755.400,00	-	-	-	-	-	62.880.400,00	-	-	-	-	-	71%	-	-	-	-	-	88.755.400,00	62.880.400,00
	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kab. Kubu Raya	96.892.200,00	-	-	43.000.000,00	-	-	96.889.200,00	-	-	41.859.000,00	-	-	100%	-	-	97%	-	-	139.892.200,00	138.748.200,00
	Penyusunan Data Base E-Formasi	-	27.048.000,00	29.236.500,00	45.800.000,00	58.924.000,00	47.556.500,00	-	24.950.000,00	29.236.500,00	43.344.300,00	58.232.200,00	47.242.500,00	-	92%	100%	95%	99%	99%	208.565.000,00	203.005.500,00
	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	-	-	51.054.900,00	23.000.000,00	52.799.375,00	28.470.000,00	-	-	49.930.900,00	22.474.500,00	52.720.600,00	28.470.000,00	-	-	98%	98%	100%	100%	155.324.275,00	153.596.000,00
	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Analisis Jabatan	-	-	-	-	93.956.700,00	77.732.000,00	-	-	-	-	92.981.600,00	77.211.000,00	-	-	-	-	99%	99%	171.688.700,00	170.192.600,00
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	48.098.000,00	43.825.900,00	58.431.200,00	130.227.000,00	118.111.853,00	-	47.487.500,00	43.825.900,00	57.905.000,00	129.615.200,00	117.697.600,00	-	99%	100%	99%	100%	100%	398.693.953,00	396.531.200,00
	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Tangga Jabatan dan Pendukung Perkantoran	-	1.020.000.000,00	1.108.200.000,00	1.153.200.000,00	1.383.900.000,00	2.102.600.000,00	-	941.570.000,00	1.103.940.000,00	1.143.800.000,00	1.377.700.000,00	2.026.600.000,00	-	92%	100%	99%	100%	96%	6.767.900.000,00	6.593.610.000,00
	Asistensi dan Penyusunan Evaluasi Jabatan	-	60.730.000,00	15.600.900,00	58.000.000,00	72.239.000,00	59.053.000,00	-	60.180.300,00	15.600.900,00	57.545.500,00	71.949.000,00	58.049.700,00	-	99%	100%	99%	100%	98%	265.622.900,00	263.325.400,00
	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	-	-	23.389.000,00	57.110.700,00	57.110.700,00	-	-	-	23.286.000,00	56.913.800,00	57.105.150,00	-	-	-	100%	100%	100%	137.610.400,00	137.304.950,00
	Penyusunan Standar Pelayanan	-	-	-	25.000.000,00	-	-	-	-	-	25.000.000,00	-	-	-	-	-	100%	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	76.373.600,00	76.373.600,00	-	-	-	-	73.992.600,00	74.506.500,00	-	-	-	-	97%	98%	152.747.200,00	148.499.100,00
	Sosialisasi Tata Naskah Dinas	-	-	-	-	58.683.400,00	58.683.400,00	-	-	-	-	58.195.000,00	58.074.650,00	-	-	-	-	99%	99%	117.366.800,00	116.269.650,00
30	Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama																				
	Facilitasi Ibadah Haji	454.409.792,00	555.224.300,00	545.373.132,00	557.813.000,00	668.495.000,00	699.335.350,00	444.009.545,00	507.839.082,00	538.682.502,00	545.415.800,00	646.085.000,00	690.343.950,00	98%	91%	99%	98%	97%	99%	3.480.650.574,00	3.372.375.879,00
	Safari Keagamaan	97.174.500,00	167.016.150,00	326.036.150,00	277.283.800,00	285.894.500,00	664.942.850,00	81.784.500,00	146.242.050,00	318.266.150,00	269.968.800,00	270.150.500,00	568.982.850,00	84%	88%	98%	97%	94%	86%	1.818.337.950,00	1.655.394.850,00
	Pembinaan Pendidikan Keagamaan	34.062.750,00	-	-	-	-	-	15.126.750,00	-	-	-	-	-	44%	-	-	-	-	-	34.062.750,00	15.126.750,00
	Facilitasi kegiatan Keagamaan dan Hari - Hari Besar Keagamaan	-	57.572.650,00	-	-	-	-	-	36.779.550,00	-	-	-	-	-	64%	-	-	-	-	57.572.650,00	36.779.550,00
	Facilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten	-	16.200.000,00	-	413.134.900,00	-	115.222.750,00	-	7.400.000,00	-	411.564.900,00	-	91.357.750,00	-	46%	-	100%	-	79%	544.557.650,00	510.322.650,00
	Facilitasi Kegiatan Keagamaan Dalam Upaya Peningkatan Mental Spiritual	38.991.250,00	-	-	-	-	-	23.617.100,00	-	-	-	-	-	61%	-	-	-	-	-	38.991.250,00	23.617.100,00
	Facilitasi Kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Provinsi	-	52.500.000,00	-	61.746.400,00	-	57.846.300,00	-	52.500.000,00	-	58.023.400,00	-	54.216.300,00	-	100%	-	94%	-	94%	172.092.700,00	164.739.700,00
	Rapat Koordinasi Bidang Keagamaan	-	31.974.550,00	-	-	-	-	-	30.326.550,00	-	-	-	-	-	95%	-	-	-	-	31.974.550,00	30.326.550,00
	Facilitasi dan Sosialisasi MTQ Tingkat Provinsi	-	200.000.000,00	4.558.723.800,00	-	85.720.500,00	-	-	192.570.700,00	4.296.029.470,00	-	82.339.100,00	-	-	96%	94%	-	96%	-	4.844.444.300,00	4.570.939.270,00
	Pengiriman Kontigen MTQ Tingkat Propinsi	121.469.588,00	-	-	-	-	-	120.995.380,00	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	121.469.588,00	120.995.380,00
	Facilitas dan Pembinaan Majelis Taklim	30.742.500,00	-	-	-	-	-	22.892.500,00	-	-	-	-	-	74%	-	-	-	-	-	30.742.500,00	22.892.500,00
	Facilitasi Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Umum Lainnya	-	-	25.380.650,00	327.366.000,00	649.734.000,00	560.266.800,00	-	25.380.650,00	326.354.000,00	611.075.800,00	505.723.900,00	-	-	100%	100%	94%	90%	1.562.747.450,00	1.468.534.350,00	
	Pendataan Petugas Fardu Kfayah Dan Guru Gaji	155.000.000,00	-	-	-	-	-	49.725.000,00	-	-	-	-	-	32%	-	-	-	-	-	155.000.000,00	49.725.000,00
31	Program Pemberdayaan Kecamatan																				
	Penyusunan Laporan WD4 Profil Kecamatan dan Laporan Harian Camat	22.341.000,00	-	-	-	-	-	9.561.000,00	-	-	-	-	-	43%	-	-	-	-	-	22.341.000,00	9.561.000,00
	Penilaian Kinerja Kecamatan	-	50.000.000,00	2.580.000,00	-	-	-	-	47.190.000,00	2.580.000,00	-	-	-	-	94%	100%	-	-	-	52.580.000,00	49.770.000,00
	Facilitasi Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	60.431.000,00	29.433.000,00	16.329.000,00	-	-	-	27.582.900,00	24.514.000,00	16.329.000,00	-	-	-	46%	83%	100%	-	-	-	106.193.000,00	68.425.900,00
	Facilitasi Peningkatan Aparatur Kecamatan	50.000.000,00	-	-	-	-	-	18.310.000,00	-	-	-	-	-	37%	-	-	-	-	-	50.000.000,00	18.310.000,00
32	Program Perumusan Kebijakan Bidang Pembangunan Daerah																				
	Facilitasi Kelompok Kerja Pemukiman Sanitasi	40.802.750,00	-	-	-	-	-	34.675.100,00	-	-	-	-	-	85%	-	-	-	-	-	40.802.750,00	34.675.100,00
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Usaha Daerah	30.976.100,00	-	31.854.656,00	-	-	-	28.476.100,00	-	31.854.656,00	-	-	-	92%	-	100%	-	-	-	62.830.756,00	60.330.756,00
	Facilitasi dan Sosialisasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	114.312.550,00	-	-	87.289.650,00	87.289.650,00	-	111.040.550,00	-	-	87.280.000,00	69.250.400,00	-	97%	-	-	100%	79%	-	288.891.850,00	267.570.950,00
	Facilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	-	39.411.500,00	28.287.700,00	-	-	-	-	39.232.500,00	28.287.700,00	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	67.699.200,00	67.520.200,00

	Facilitasi dan Koordinasi Kelompok Kerja Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman	-	65.300.000,00	6.219.800,00	81.848.300,00	81.848.300,00	-	-	53.042.450,00	6.219.700,00	81.321.600,00	74.069.600,00	-	-	81%	100%	99%	90%	-	235.216.400,00	214.653.350,00
	Facilitasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kabupaten Kubu Raya	34.921.100,00	58.680.000,00	24.424.200,00	92.008.550,00	92.008.550,00	92.258.550,00	25.871.100,00	58.677.100,00	23.543.632,00	90.461.300,00	88.044.000,00	90.702.300,00	74%	100%	96%	98%	96%	98%	394.300.950,00	377.299.432,00
	Facilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Daerah	-	-	29.099.590,00	-	-	-	-	-	29.099.590,00	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	29.099.590,00	29.099.590,00
	Facilitasi, Monitoring Dan Koordinasi SIRUP	-	-	-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-	74.411.000,00	73.422.900,00	-	-	-	-	99%	98%	150.000.000,00	147.833.900,00
33	Program Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah																				
	Koordinasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah	55.023.750,00	-	-	-	-	-	55.013.750,00	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	55.023.750,00	55.013.750,00
	Peningkatan Koordinasi Program Ekonomi Kerakyatan	37.842.200,00	-	-	-	-	-	37.842.200,00	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	37.842.200,00	37.842.200,00
	Facilitasi Pembinaan Usaha Daerah	5.025.000,00	-	-	-	-	-	5.024.000,00	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	5.025.000,00	5.024.000,00
	Monitoring dan Koordinasi Pengelolaan Usaha Daerah	35.753.500,00	36.460.000,00	-	63.683.600,00	63.683.600,00	73.888.600,00	34.050.750,00	35.178.425,00	-	63.320.400,00	53.503.200,00	71.888.600,00	95%	96%	-	99%	84%	97%	273.469.300,00	257.941.375,00
	Facilitasi Kemitraan Usaha	24.087.500,00	-	-	-	-	-	23.910.110,00	-	-	-	-	-	99%	-	-	-	-	-	24.087.500,00	23.910.110,00
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kubu Raya	23.942.000,00	-	-	-	-	-	23.942.000,00	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	23.942.000,00	23.942.000,00
	Facilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	23.653.000,00	-	-	-	-	-	19.789.400,00	-	-	-	-	-	84%	-	-	-	-	-	23.653.000,00	19.789.400,00
	Facilitasi Tim dan Sosialisasi Pengendalian Inflasi Daerah Kab. Kubu Raya	16.200.000,00	-	-	-	84.518.600,00	-	16.174.500,00	-	-	84.023.750,00	-	-	100%	-	-	99%	-	-	100.718.600,00	100.198.250,00
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	-	41.150.000,00	17.664.300,00	20.828.000,00	20.828.000,00	-	-	38.726.300,00	17.664.300,00	20.827.000,00	20.792.500,00	-	-	94%	100%	100%	100%	-	100.470.300,00	98.010.100,00
	Facilitasi Tim Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kubu Raya	-	43.978.500,00	30.067.891,00	42.560.000,00	42.560.000,00	63.388.000,00	-	39.090.375,00	30.067.891,00	42.367.000,00	40.978.100,00	63.048.400,00	-	89%	100%	100%	96%	99%	222.554.391,00	215.551.766,00
	Facilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kubu Raya	-	82.860.000,00	34.570.845,00	-	84.518.600,00	84.518.600,00	-	77.561.300,00	34.570.845,00	-	83.056.000,00	82.216.900,00	-	94%	100%	-	98%	97%	286.468.045,00	277.405.045,00
	Facilitasi dan Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	81.660.000,00	-	-	-	-	-	78.883.000,00	-	-	-	-	-	97%	81.660.000,00	78.883.000,00
34	Program Peningkatan Kinerja Badan Usaha Daerah																				
	Fit and Proper Test Direktur PDAM Kabupaten Kubu Raya	-	-	109.160.600,00	-	-	121.875.000,00	-	-	31.211.007,00	-	-	112.113.600,00	-	-	29%	-	-	-	231.035.600,00	143.324.607,00
35	Program Pembedayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial																				
	Sosial dan Koordinasi Program Bantuan Sosial	60.870.100,00	-	-	-	-	-	42.004.600,00	-	-	-	-	-	69%	-	-	-	-	-	60.870.100,00	42.004.600,00

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Eksistensi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis serta menyelenggarakan tugas pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan lingkup tugas.

1. Masalah Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan, sehingga penerapan *“the right man on the right place”* belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/propinsi dan institusi lain sesuai dengan bidang kewenangannya.

2. Masalah sarana dan prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja pada setiap bidang pemerintahan secara umum masih kurang memadai baik dari kualitas maupun kuantitas. Untuk mengatasinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya berusaha melakukan penambahan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap mengingat kemampuan anggaran yang terbatas, dimana penambahan-penambahan tersebut disesuaikan dengan standar kualitas yang dibutuhkan. Disamping itu pemeliharaan secara rutin dan berkala juga dilakukan agar sarana dan prasarana tetap dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya dalam upaya menunjang pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target kinerja yang efektif dan efisien.

3. Masalah Sistem dan Prosedur.

Adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja berdampak secara langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Adanya perbedaan dalam pemahaman sistem dan prosedur yang baru berpengaruh pada pelaksanaan program kegiatan dan pada akhirnya berpengaruh pula terhadap pencapaian target kinerja.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap sistem dan prosedur yang baru adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten.

4. Krisis Kesehatan Nasional dan Dunia

Seperti diketahui pada tahun 2020, timbul permasalahan global yang juga berdampak pada perekonomian nasional di Indonesia. Timbulnya pandemi Covid-19 telah melumpuhkan banyak sektor di Indonesia, baik perekonomian, kesehatan, hingga permasalahan sosial.

Dengan adanya pandemi Covid-19, juga berdampak langsung pada pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Dengan dilaksanakannya *Work From Home* (WFH) serta pembatasan sosial dengan meniadakan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa, maka beberapa program dan kegiatan harus dibatalkan pelaksanaannya atau dengan menggelar kegiatan secara *virtual* atau melalui *Video Conference*, namun secara kualitas pelaksanaan dapat dikatakan tidak maksimal.

Pergeseran dan pengurangan anggaran juga dilaksanakan terhadap kegiatan-kegiatan yang batal dilaksanakan untuk menunjang kekuatan anggaran Pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis dapat disusun kedalam tabel matriks di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD	Bagian
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan LPPD / LKPj SKPD, Laporan LKjIP SKPD	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Data dukung dari seluruh Bagian	Data dukung dari seluruh <i>stakeholder</i>	Penyampaian Data Dukung yang tidak tepat waktu	Bagian Perencanaan dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Data dukung dari seluruh Bagian	Data dukung dari seluruh <i>stakeholder</i>	Penyampaian Data Dukung yang tidak tepat waktu	Bagian Perencanaan dan Keuangan
Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra, Renja	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Data Dukung dari seluruh Bagian	Data dukung dari seluruh <i>stakeholder</i>	1. Kualitas SDM dalam penyusunan data perencanaan 2. Penyampaian data yang tidak tepat waktu	Bagian Perencanaan dan Keuangan
Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga Lainnya	Dokumen Perjanjian Kerjasama	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Fasilitasi 2. Koordinasi dan Konsultasi	Data dukung untuk fasilitasi Kerjasama daerah dan Lembaga lainnya	Belum ditindak lanjutnya seluruh Kerjasama dengan perjanjian kerjasama	Bagian Kerjasama dan Pertanahan
Batas Wilayah	Batas Wilayah Kabupaten, dan Antar Kecamatan	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Fasilitasi 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Pembinaan	Data dukung batas wilayah kecamatan dan desa	Sering terjadinya permasalahan tentang batas wilayah	Bagian Tata Pemerintahan

Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Pelaksanaan pengadaan barang / jasa telah sesuai dengan SOP	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	Tenaga Fungsional UKPBJ	Aturan / Payung Hukum Pemerintah Pusat dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Ketidaksesuaian aturan / Payung Hukum Pemerintah Pusat dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dengan kondisi di daerah	Bagian Pengadaan Barang / Jasa
Produk Hukum Daerah, Pelayanan dan Kesadaran Hukum serta Publikasi	-	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Tenaga Publikasi 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Tenaga Penyusun Produk Hukum (<i>Legal Drafting</i>)	1. Proses Penyusunan Produk Hukum di SKPD 2. Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Taat kepada Peraturan Perundang-Undangan	1. Kurangnya Tenaga Publikasi 2. Belum Optimalnya Aplikasi JDIIH 3. Kurangnya Tenaga <i>Legal Drafting</i>	Bagian Hukum
Penataan Kelembagaan	100% sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelembagaan perangkat daerah	1. UU No. 23 tahun 2014 2. PP No. 18 tahun 2016	1. Pengumpulan Data kelembagaan 2. Mengkoordinasikan penyusunan draft raperda kelembagaan perangkat daerah dan draft Peraturan Bupati tentang tugas pokok dan fungsi 3. Menyusun draft Perda kelembagaan perangkat daerah 4. Menyusun draft Peraturan Bupati tentang tugas pokok dan fungsi SKPD 5. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka evaluasi dan pelaporan kelembagaan perangkat daerah	1. Pemahaman akan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD 2. Kompetensi teknis masing-masing SKPD 3. Pembahasan draft Raperda kelembagaan Perangkat Daerah bersama DPRD 4. Pemahaman pejabat akan tugas pokok fungsinya	1. Jumlah dan kualitas tenaga analisa kelembagaan yang belum memadai 2. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran SKPD akan arti penting Penataan Kelembagaan 3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait 4. Jumlah dan kualitas tenaga analisa jabatan yang belum memadai	Bagian Organisasi

			6. Melaksanakan Anjab dan ABK 7. Melaksanakan evaluasi jabatan		5. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran SKPD akan arti penting anjab dan abk 6. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait	
Ketatalaksanaan	1. Banyaknya SKPD yang belum menyusun standar pelayanan 2. Pelayanan SKPD belum sesuai dengan SOP 3. Banyaknya SKPD yang belum membentuk KBK 4. Rendahnya inovasi pelayanan SKPD	SOP pelayanan masing-masing SKPD	3. Fasilitasi penyusunan SOP 4. Fasilitasi pembentukan KBK 5. Fasilitasi inovasi pelayanan OPD	1. Banyaknya jenis pelayanan masing-masing SKPD 2. Kesadaran SKPD untuk menyusun Standar Pelayanan 3. Kebutuhan SKPD untuk membentuk KBK	1. Jumlah tenaga pengolah data ketatalaksanaan yang belum memadai 2. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran SKPD akan arti penting ketatalaksanaan 3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait	Bagian Organisasi
Reformasi Birokrasi	Road Map Reformasi Birokrasi	Permenpan RB tentang Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	1. Pemahaman SKPD Tentang Reformasi Birokrasi 2. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	1. Jumlah tenaga pengolah data PAN RB yang belum memadai 2. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran SKPD akan arti penting reformasi birokrasi	Bagian Organisasi

					3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait	
Tata Usaha dan Kepegawaian	Daftar Urut Kepegawaian	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Fasilitas Penyusunan DUK 2. Data Dukung Seluruh Bagian	1. Mutasi dan Masa Pensiun Pegawai	Kurang Tenaga Pengolah Data Kepegawaian	Bagian Umum
Perencanaan dan Keuangan	APBD Sekretariat Daerah	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Fasilitas Penyusunan DPA 2. Data Dukung (RKA) dari Bagian 3. Pemahaman Bagian Tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	1. Sistem Operasi Perencanaan Anggaran dan Penatausahaan Keuangan	Kurangnya Pemahaman Bagian Tentang Penyusunan Perencanaan Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
Rumah Tangga dan Perlengkapan	-	-	1. Sarana dan Prasarana Pelayanan 2. Tenaga Lapangan	Permohonan Pelayanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan dari Instansi didalam dan diluar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Kurangnya Sarana dan Prasarana dan Tenaga Personil dalam Pelaksanaan Pelayanan Pimpinan	Bagian Umum
Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis untuk peningkatan kesejahteraan rakyat	Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji	-	1. Fasilitas 2. Koordinasi	1. Data Dukung dari Desa dan Kecamatan	1. Kurangnya personil pengolah data dalam pelaksanaan fasilitas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji 2. Monitoring dan Evaluasi yang masih kurang dilaksanakan	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan indikasi permasalahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

1. Kurang akuratnya data dalam penyusunan laporan kinerja pemerintahan;
2. Belum ditindaklanjutinya seluruh kerjasama antar daerah dan lembaga melalui perjanjian kerjasama;
3. Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah masih mengalami kendala;
4. Masih terbenturnya permasalahan pengadaan barang dan jasa antara peraturan pemerintah pusat dengan kondisi di daerah;
5. Kurangnya tenaga penyusun produk hukum (*legal drafting*);
6. Jumlah dan kualitas Sumber Daya Aparatur di bidang organisasi dan ketatalaksanaan yang belum memadai;
7. Kurangnya pemahaman Sumber Daya Aparatur dalam penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan;
8. Kurangnya Sumber Daya Aparatur dalam pelayanan kedinasan pimpinan;
9. Kurangnya personil pengolah data dalam pelaksanaan fasilitasi Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji.

Adapun kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dalam mengantisipasi isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Meningkatkan koordinasi antar Bidang / Bagian terkait dalam penyusunan laporan kinerja pemerintahan;
2. Percepatan penyusunan perjanjian kerjasama antar daerah dan lembaga;
3. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan batas-batas wilayah di daerah;
4. Meningkatkan koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah;
5. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas melalui pendidikan dan pelatihan berupa Bimbingan Teknis, seminar, workshop, maupun mengikuti pameran / expo;
6. Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan aset (tanah) dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat luas, dan menyelesaikan sengketa batas wilayah yang terjadi;
7. Meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji, dan meningkatkan pembinaan pada lembaga keagamaan, guru-guru, tokoh masyarakat, sehingga tidak terjadi gesekan yang berkaitan dengan agama dan etnis;

B. TELAAH VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Melihat kondisi dan situasi pada masa sekarang ini yang mengalami era globalisasi dan mengantisipasi tantangan pada masa yang akan datang, Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu organisasi Pemerintah dan Perangkat Daerah perlu terus menerus mengembangkan dan meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.

Visi Sekretariat Daerah dirumuskan dengan memperhatikan visi Bupati / Wakil Bupati yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024. Adapun visi dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah

"Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius"

Dalam memujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi yang merupakan dasar keberadaan suatu organisasi. Adapun misi Sekretariat Daerah yaitu mengejar pencapaian dari misi pertama Kabupaten Kubu Raya yaitu :

"Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)"

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Program berdasarkan urusan yang ditangani Sekretariat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
6. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
7. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
8. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
9. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
10. Program Peningkatkan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertahanan
12. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
13. Program Implementasi LPSE
14. Promosi Perencanaan Pembangunan Daerah
15. Peningkatan Kapasitas Pekerjaan Sosial
16. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
17. Pogram Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
18. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
19. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
20. Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Kehutanan
21. Program Penataan Kecamatan / Kelurahan
22. Pembinaan Dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan Aparatur Pemerintahan Daerah
23. Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama
24. Program Perumusan Kebijakan Bidang Pembangunan Daerah
25. Program Perumusan Kebijakan Perumusan Perekonomian Daerah

26. Program Peningkatan Kinerja Badan Usaha Daerah

Dengan terbitnya Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian diverifikasi melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah kemudian ditetapkan Kembali melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program berdasarkan urusan yang ditangani Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan rincian sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
 1. Program Pengelolaan Izin Lokasi
 2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
 4. Program Pengelolaan Tanah Kosong
 5. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
 6. Program Penatagunaan Tanah
- b. Urusan Sekretariat Daerah
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 3. Program Perekonomian dan Pembangunan

C. TELAAH RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan, dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran institusi harus selaras dengan Pemerintah Pusat. Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, sebagai institusi di daerah menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat sebagai institusi perencana di tingkat pusat dan kementerian / lembaga yang terkait. Dalam pelaksanaannya sinergitas program dan kegiatan Pemerintah Pusat dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang disusun oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya masih terdapat kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategis, yaitu:

1. Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
2. Masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia perencana pembangunan di daerah.

3. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan penafsiran yang beragam. Hal ini menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antar daerah serta antara pusat dan daerah.

D. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dimaksudkan sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten oleh pemerintah daerah kabupaten dan para pemangku kepentingan lainnya. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota merupakan alat pengaturan, pengendalian dan pengarahan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten / Kota.

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Penataan ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya dituangkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya yang berfungsi sebagai acuan dalam mengembangkan rencana struktur dan rencana pola ruang Kabupaten Kubu Raya, dalam rangka mewujudkan masyarakat Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya serta Memiliki Daya Saing.

Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dipahami bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan koordinasi teknis serta menyelenggarakan tugas pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan lingkup tugas, yang dapat dibagi kedalam 3 (tiga) peran utama yaitu sebagai pengambil kebijakan, sebagai koordinator pembangunan daerah, sebagai pelayanan administrasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Rencana Strategik Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kubu Raya sehingga perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah tidak boleh bertentangan dengan dan harus mendukung tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dan perubahannya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yaitu :

1. Misi 1 RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 yaitu Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*).

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam rangka mendukung capaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yaitu Sasaran didalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 :

- a. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
- b. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A (80,05)	A (80,15)	A (80,35)	BB (71,20)	BB (71,30)	BB (71,40)
2	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (84,50)	B (85,00)	B (85,50)	B (85,80)	B (86,00)	B (86,20)

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya

Visi	Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius		
Misi	Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa (<i>Good and Clean Governance</i>)		
Tujuan	1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 2. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat		
Sasaran	1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah 2. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	1. Meningkatkan Koordinasi di Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Terkait Akuntabilitas Kinerja 3. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja 4. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Unit Kerja	1. Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 2. Sosialisasi / Bimbingan Teknis Terkait Akuntabilitas Kinerja 3. Asistensi dan Bimbingan tentang Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitasi, Konsultasi, dan Evaluasi di Bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Pengembangan Kinerja
	2. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	1. Optimalisasi Sistem Informasi Hukum Daerah 2. Optimalisasi Bantuan Hukum Kepada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa 3. Optimalisasi Pengadaan Barang dan Jasa 4. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Melalui Dukungan Pelayanan Sarana dan Prasarana 5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keprotokolan	1. Peningkatan Publikasi dan Konsultasi Produk Hukum Daerah melalui Sistem JDIH Kabupaten Kubu Raya 2. Pemberian Bantuan Hukum atas Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara serta Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum 3. Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Menurut Skala Prioritas dengan Diikuti Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengelola 5. Peningkatan Koordinasi dengan Instansi Terkait Guna Mewujudkan Kualitas Pelayanan Keprotokolan yang Prima dan Meningkatkan Kemampuan Teknis Bidang Keprotokolan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019-2024

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Sekretariat Daerah yang diterapkan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi.

Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi.

Program dan Kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani Sekretariat Daerah dengan rincian sebagai dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN III (RPJMD-P KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2019-2024)				SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA														
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya																		
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Tahun-6 (2024)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Izin Lokasi	26.245.900	%	100	117.446.500	100	115.576.400	100	231.355.703	100	66.742.600	100	75.000.000	100	82.500.000	600	688.621.203	Sekretariat Daerah
- Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah / Kabupaten Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah / Kabupaten Kota	26.245.900	%	100	117.446.500	100	115.576.400	100	231.355.703	100	66.742.600	100	75.000.000	100	82.500.000	600	688.621.203	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Dokumen Kepatuhan Perusahaan Terhadap Peraturan Pemerintah	26.245.900	Dokumen	1	117.446.500	1	115.576.400	1	231.355.703	1	66.742.600	1	75.000.000	1	82.500.000	6	688.621.203	Sekretariat Daerah
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Pelaksanaan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	305.220.700	%	100	356.616.000	100	318.169.000	100	316.140.399	100	383.338.120	100	800.000.000	100	880.000.000	600	3.054.263.519	Sekretariat Daerah
- Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	305.220.700	%	100	356.616.000	100	318.169.000	100	316.140.399	100	383.338.120	100	800.000.000	100	880.000.000	600	3.054.263.519	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300.000.000	1	330.000.000	2	630.000.000	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	305.220.700	Berita Acara	12	356.616.000	12	318.169.000	12	316.140.399	12	383.338.120	16	500.000.000	12	550.000.000	76	2.424.263.519	Sekretariat Daerah
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelaksanaan Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	8.956.933.750	%	100	3.629.200.400	100	136.346.400	100	2.794.278.588	100	653.105.440	100	752.309.885	100	827.540.874	600	8.792.781.587	Sekretariat Daerah
- Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	8.956.933.750	%	100	3.629.200.400	100	136.346.400	100	2.794.278.588	100	653.105.440	100	752.309.885	100	827.540.874	600	8.792.781.587	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Keputusan Bupati Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	136.852.850	Dokumen	1	41.310.800	1	98.880.600	1	202.066.438	1	419.399.900	1	482.309.885	1	530.540.874	6	1.774.508.497	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	8.820.080.900	Dokumen	1	3.587.889.600	1	37.465.800	1	2.592.212.150	1	233.705.540	1	270.000.000	1	297.000.000	6	7.018.273.090	Sekretariat Daerah
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Tanah Kosong	51.180.000	%	-	-	100	141.543.000	100	177.020.018	100	242.352.410	100	242.352.410	100	266.587.651	500	1.069.855.489	Sekretariat Daerah
- Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	51.180.000	%	-	-	100	141.543.000	100	177.020.018	100	242.352.410	100	242.352.410	100	266.587.651	500	1.069.855.489	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten yang Diinventarisasi	51.180.000	Laporan	-	-	1	141.543.000	1	177.020.018	1	242.352.410	1	242.352.410	1	266.587.651	6	1.069.855.489	Sekretariat Daerah
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	141.104.000	%	-	-	-	-	-	-	-	-	100	250.000.000	100	275.000.000	200	525.000.000	Sekretariat Daerah
- Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah	141.104.000	%	-	-	-	-	-	-	-	-	100	250.000.000	100	275.000.000	200	525.000.000	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	141.104.000	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	250.000.000	1	275.000.000	2	525.000.000	Sekretariat Daerah

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN III
(RPJMD-P KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024)

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Program Penatagunaan Tanah	Persentase Pelaksanaan Program Penatagunaan Tanah	141.104.000	%	100	419.323.300	100	743.413.000	100	327.488.792	100	465.977.200	100	535.873.000	100	589.460.300	600	3.081.535.592	Sekretariat Daerah
- Kegiatan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten / Kota	141.104.000	%	100	419.323.300	100	743.413.000	100	327.488.792	100	465.977.200	100	535.873.000	100	589.460.300	100	3.081.535.592	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten / Kota	141.104.000	Dokumen	60	419.323.300	60	743.413.000	60	327.488.792	60	465.977.200	150	535.873.000	150	589.460.300	540	3.081.535.592	Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	24.130.196.929	%	100	32.504.175.182	100	28.600.213.709	100	27.280.502.195	100	29.524.148.171	100	34.918.189.767	100	38.410.008.744	600	191.237.237.767	Sekretariat Daerah
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.388.000	%	100	28.970.000	100	58.412.350	100	50.429.790	100	175.637.600	100	213.911.200	100	235.302.320	600	762.663.260	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.999.500	Dokumen	2	13.750.000	2	7.220.300	2	32.292.490	2	43.086.600	2	49.548.000	2	54.502.800	12	200.400.190	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.682.250	Dokumen	1	4.435.000	1	9.838.139	-	-	1	35.064.700	1	40.107.700	1	44.118.470	5	133.564.009	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.682.250	Dokumen	1	4.435.000	1	9.838.137	-	-	1	47.065.200	2	54.123.200	2	59.535.520	7	174.997.057	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	Dokumen	-	-	1	9.838.137	-	-	-	-	1	6.026.300	1	6.628.930	3	22.493.367	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	Dokumen	-	-	1	9.838.137	-	-	-	-	2	7.731.400	2	8.504.540	5	26.074.077	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.024.000	Dokumen	2	6.350.000	2	11.839.500	2	18.137.300	2	50.421.100	2	56.374.600	2	62.012.060	12	205.134.560	Sekretariat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	8.131.104.740	%	100	9.556.048.390	100	11.047.157.645	100	12.911.407.116	100	13.013.892.612	100	15.016.047.100	100	16.517.651.810	600	78.062.204.673	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.092.925.740	Orang / Bulan	100	9.521.520.440	100	11.012.020.895	105	12.467.001.716	105	12.746.090.312	105	14.658.003.800	105	16.123.804.180	620	76.528.441.343	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	24.098.000	Dokumen	11520	24.097.950	11520	18.997.950	11520	368.787.320	11520	172.235.400	11520	239.696.400	12672	263.666.040	70272	1.087.481.060	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.352.000	Laporan	1	5.680.000	1	9.957.100	1	27.346.830	1	39.766.700	1	45.251.300	1	49.776.430	6	177.778.360	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	4.729.000	Laporan	17	4.750.000	17	6.181.700	17	48.271.250	17	55.800.200	17	73.095.600	17	80.405.160	102	268.503.910	Sekretariat Daerah
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	%	-	-	-	-	-	-	-	-	100	129.328.000	100	142.260.800	200	271.588.800	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	129.328.000	1	142.260.800	2	271.588.800	Sekretariat Daerah
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	413.535.025	%	100	506.970.000	100	228.875.000	100	128.315.000	100	246.782.000	100	246.782.000	100	271.460.200	600	1.629.184.200	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	124.260.000	Paket	1	75.355.600	-	-	-	-	1	182.670.000	1	182.670.000	1	200.937.000	3	641.632.600	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	413.535.025	Orang	15	506.970.000	15	228.875.000	15	128.315.000	15	64.112.000	12	64.112.000	12	70.523.200	84	1.062.907.200	Sekretariat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.780.779.600	%	100	1.438.977.800	100	1.267.402.575	100	1.177.770.100	100	1.299.106.853	100	2.006.729.744	100	2.207.402.718	600	9.397.389.790	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	59.016.500	Paket	4	60.000.000	4	50.000.000	4	16.083.200	4	79.994.600	4	89.049.600	4	97.954.560	24	393.081.960	Sekretariat Daerah

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN III
(RPJMD-P KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024)**

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	91.477.500	Paket	4	96.691.800	4	65.721.900	4	674.251.840	4	733.267.193	4	945.293.344	4	1.039.822.678	24	3.555.048.755	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	65.620.000	Paket	12	65.620.000	12	52.100.000	12	64.587.060	12	67.587.060	12	74.345.700	12	81.780.270	72	406.020.090	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	79.920.000	Paket	12	79.920.000	12	79.920.000	12	79.920.000	-	-	-	-	-	-	24	239.760.000	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.484.745.600	Laporan	12	1.136.746.000	12	1.019.660.675	12	342.928.000	12	418.258.000	12	807.910.000	12	888.701.000	72	4.614.203.675	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	90.131.100	1	99.144.210	2	189.275.310	Sekretariat Daerah	
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.029.565.000	%	100	6.502.200.000	100	2.031.618.250	100	943.128.758	100	1.751.076.159	100	1.872.209.527	100	2.059.430.480	600	15.159.663.174	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Unit	3	5.768.000.000	3	440.000.000	3	399.559.000	1	27.889.000	3	399.559.000	3	439.514.900	16	7.474.521.900	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	134.174.000	Unit	5	241.500.000	5	289.776.250	5	100.865.270	48	234.278.330	30	371.585.010	35	408.743.511	128	1.646.748.371	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	781.659.000	Unit	6	492.700.000	6	903.342.000	6	301.836.448	61	1.411.254.429	50	947.345.517	50	1.042.080.069	179	5.098.558.463	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	113.732.000	Unit	-	-	14	398.500.000	14	140.868.040	150	77.654.400	150	153.720.000	150	169.092.000	478	939.834.440	Sekretariat Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.613.236.631	%	100	3.779.000.000	100	4.584.355.000	100	3.289.473.306	100	3.479.197.650	100	3.904.517.000	100	4.294.968.700	600	23.331.511.656	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.382.380.000	Laporan	12	2.102.600.000	12	2.884.000.000	12	1.402.652.576	12	707.797.650	12	714.017.000	12	785.418.700	72	8.596.485.926	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	730.640.631	Laporan	12	1.018.400.000	12	1.131.400.000	12	923.520.730	12	1.098.000.000	12	1.338.000.000	12	1.471.800.000	72	6.981.120.730	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	144.249.000	Laporan	12	220.400.000	12	94.700.000	12	303.300.000	12	1.013.400.000	12	1.166.100.000	12	1.282.710.000	72	4.080.610.000	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	355.967.000	Laporan	12	437.600.000	12	474.255.000	12	660.000.000	12	660.000.000	12	686.400.000	12	755.040.000	72	3.673.295.000	Sekretariat Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.596.443.857	%	100	1.681.540.000	100	2.232.248.000	100	1.528.084.400	100	2.151.937.664	100	2.382.220.164	100	2.620.442.180	600	12.596.472.408	Sekretariat Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	867.964.857	Unit	54	1.223.000.000	54	1.410.900.000	54	999.988.400	54	1.477.107.500	54	1.629.890.000	60	1.792.879.000	330	8.533.764.900	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	412.083.000	Gedung	1	50.000.000	1	536.000.000	1	337.886.000	1	274.080.164	1	274.080.164	1	301.488.180	6	1.773.534.508	Sekretariat Daerah
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	316.396.000	Unit	120	408.540.000	120	285.348.000	120	190.210.000	120	400.750.000	120	478.250.000	130	526.075.000	730	2.289.173.000	Sekretariat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	743.900.376	%	100	852.538.792	100	746.556.314	100	1.850.098.856	100	1.387.867.156	100	1.852.935.000	100	2.038.228.500	600	8.728.224.618	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	143.900.376	Orang / Bulan	28	177.183.192	28	146.556.314	28	275.366.156	28	275.366.156	28	302.902.700	28	333.192.970	168	1.510.567.488	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-	Paket	2	75.355.600	-	-	2	11.684.700	2	8.720.000	2	8.720.000	2	9.592.000	10	114.072.300	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	Orang	50	600.000.000	50	600.000.000	50	1.563.048.000	50	1.103.781.000	50	1.541.312.300	50	1.695.443.530	300	7.103.584.830	Sekretariat Daerah

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN III
(RPJMD-P KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024)

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

- Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.764.194.600	%	100	2.740.500.000	100	2.302.653.850	100	2.107.320.000	100	2.411.200.000	100	2.521.200.000	100	2.773.320.000	600	14.856.193.850	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	791.278.200	Paket	4	1.374.300.000	4	1.148.700.000	4	1.096.140.000	4	1.151.200.000	4	1.177.600.000	4	1.295.360.000	24	7.243.300.000	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	527.518.800	Paket	4	916.200.000	4	765.800.000	4	797.580.000	4	832.800.000	4	859.200.000	4	945.120.000	24	5.116.700.000	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	445.397.600	Paket	4	450.000.000	4	388.153.850	4	213.600.000	4	427.200.000	4	484.400.000	4	532.840.000	24	2.496.193.850	Sekretariat Daerah
- Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penataan Organisasi	1.213.043.850	%	100	1.022.939.505	100	582.274.100	100	489.843.166	100	469.773.987	100	1.456.539.800	100	1.602.193.780	600	5.623.564.338	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	483.564.550	Dokumen	6	418.679.500	6	238.749.550	6	163.329.503	6	153.636.700	6	485.256.840	6	533.782.524	36	1.993.434.617	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	371.439.600	Laporan	7	314.909.505	7	141.130.650	7	163.281.160	5	158.243.627	7	251.584.280	7	276.742.708	40	1.305.891.930	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	358.039.700	Dokumen	11	289.350.500	11	202.393.900	11	163.232.503	5	157.893.660	11	283.637.020	11	312.000.722	60	1.408.508.305	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	5	200.886.100	5	220.974.710	10	421.860.810	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	235.175.560	1	258.693.116	2	493.868.676	Sekretariat Daerah
- Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolkan dan Komunikasi Pimpinan	4.798.005.250	%	100	5.417.430.200	100	3.518.660.625	100	2.804.631.703	100	3.137.676.490	100	3.315.770.232	100	3.647.347.255	600	21.841.516.505	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolkan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolkan	2.668.422.250	Laporan	4	3.097.511.500	4	1.679.973.325	4	1.452.141.430	4	1.595.068.500	4	1.596.521.500	4	1.756.173.650	24	11.177.389.905	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.598.704.000	Laporan	4	1.722.158.000	4	1.430.914.400	4	704.325.000	4	940.283.000	4	1.115.868.740	4	1.227.455.614	24	7.141.004.754	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	530.879.000	Laporan	4	597.760.700	4	407.772.900	4	648.165.273	4	602.324.990	4	603.379.992	4	663.717.991	24	3.523.121.846	Sekretariat Daerah
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	7.799.454.100	Kegiatan	100	10.554.366.050	100	8.716.716.850	100	9.296.770.676	100	8.991.027.946	100	10.244.869.929	100	11.269.356.921	600	59.073.108.372	Sekretariat Daerah
- Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	1.385.306.300	%	100	1.500.904.650	100	571.062.950	100	540.969.789	100	971.645.460	100	1.346.774.730	100	1.481.452.203	600	6.412.809.782	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	305.199.000	Dokumen	1	484.180.000	1	113.855.200	1	182.667.420	4	286.499.530	2	348.749.790	2	383.624.769	11	1.799.576.709	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	311.997.300	Dokumen	1	476.122.800	1	158.111.000	1	149.517.890	9	438.024.940	2	688.024.940	2	756.827.434	16	2.666.629.004	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	768.110.000	Dokumen	1	540.601.850	1	299.096.750	1	208.784.479	7	247.120.990	4	310.000.000	4	341.000.000	18	1.946.604.069	Sekretariat Daerah
- Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.193.352.000	%	100	7.252.453.050	100	5.785.916.200	100	6.624.370.953	100	5.453.557.946	100	5.998.913.741	100	6.598.805.115	600	37.714.017.004	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	728.424.100	Dokumen	7	872.404.400	7	342.930.300	7	670.730.255	7	304.792.860	7	335.272.146	7	368.799.361	42	2.894.929.322	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	611.075.800	Dokumen	3	560.266.800	3	260.840.700	3	259.613.785	3	255.938.415	3	281.532.257	3	309.685.482	18	1.927.877.439	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	3.853.852.100	Dokumen	5	5.819.781.850	5	5.182.145.200	5	5.694.026.913	5	4.892.826.671	5	5.382.109.338	5	5.920.320.272	30	32.891.210.244	Sekretariat Daerah
- Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	983.365.800	%	100	1.375.776.350	100	911.147.000	100	706.130.900	100	1.030.331.780	100	1.133.364.958	100	1.246.701.454	600	6.403.452.442	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	620.622.200	Dokumen	1158	692.456.950	1158	645.588.100	1158	384.682.240	1158	549.817.650	1158	604.799.415	1158	665.279.357	6948	3.542.623.712	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	204.985.200	Kasus	3	203.486.500	3	193.569.900	3	180.750.900	3	297.744.670	3	327.519.137	3	360.271.051	18	1.369.772.258	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	157.758.400	Dokumen	808	479.832.900	808	71.989.000	808	140.697.760	800	182.769.460	808	201.046.406	808	221.151.047	4840	1.297.486.573	Sekretariat Daerah
- Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	237.430.000	%	100	425.232.000	100	1.448.590.700	100	1.425.299.034	100	1.535.492.760	100	1.765.816.500	100	1.942.398.150	600	8.542.829.144	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	179.975.000	Dokumen	12	388.682.000	12	1.266.113.000	12	1.161.073.793	12	1.425.531.200	12	1.639.360.800	12	1.803.296.880	72	7.684.057.673	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	57.455.000	Dokumen	1	36.550.000	1	112.760.000	1	154.307.837	1	13.023.480	1	14.977.000	1	16.474.700	6	348.093.017	Sekretariat Daerah

- Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	-	Laporan	-	-	1	69.717.700	1	109.917.404	1	96.938.080	1	111.478.700	1	122.626.570	5	510.678.454	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan	1.898.865.850	Kegiatan	100	2.189.473.350	100	1.326.246.650	100	1.288.615.713	100	2.053.385.820	100	3.308.678.366	100	3.639.546.203	600	13.805.946.102	Sekretariat Daerah
- Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah	194.710.850	%	100	298.523.100	100	207.294.650	100	140.216.595	100	365.895.260	100	402.484.786	100	442.733.265	600	1.857.147.656	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-	Dokumen	1	121.875.000	1	136.644.950	1	35.045.515	2	146.449.800	1	161.094.780	1	177.204.258	7	778.314.303	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	103.786.150	Laporan	-	-	1	30.033.700	1	70.050.825	3	112.747.580	3	124.022.338	3	136.424.572	11	473.279.015	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	90.924.700	Dokumen	1	176.648.100	1	40.616.000	1	35.120.255	1	106.697.880	1	117.367.668	1	129.104.435	6	605.554.338	Sekretariat Daerah
- Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	467.799.900	%	100	483.957.050	100	114.059.600	100	70.101.110	100	220.008.560	100	359.913.320	100	395.904.652	600	1.643.944.292	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	154.043.300	Dokumen	1	155.169.900	1	33.825.950	1	25.105.280	1	97.041.760	1	117.124.960	1	128.837.456	6	557.105.306	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-	Laporan	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100.210.960	1	110.232.056	2	210.443.016	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	313.756.600	Laporan	1	328.787.150	1	80.233.650	1	44.995.830	1	122.966.800	1	142.577.400	1	156.835.140	6	876.395.970	Sekretariat Daerah
- Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.078.829.300	%	100	1.244.323.200	100	920.190.500	100	967.620.163	100	1.131.735.710	100	1.948.155.680	100	2.142.971.248	600	8.354.996.501	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	40.121.600	Dokumen	150	360.834.200	150	27.926.750	150	565.608.350	68	592.800.300	180	1.265.614.600	200	1.392.176.060	898	4.204.960.260	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	901.658.700	Dokumen	5	799.547.400	5	890.439.850	5	231.933.390	68	282.342.250	5	367.345.000	5	404.079.500	93	2.975.687.390	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	137.049.000	Orang	4	83.941.600	4	1.823.900	4	170.078.423	4	256.593.160	200	315.196.080	300	346.715.688	516	1.174.348.851	Sekretariat Daerah
- Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	157.525.800	%	100	162.670.000	100	84.701.900	100	110.677.845	100	335.746.290	100	598.124.580	100	657.937.038	600	1.949.857.653	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	73.482.600	Dokumen	1	72.670.000	1	31.475.950	1	36.722.725	1	93.672.090	2	142.641.730	2	156.905.903	8	534.088.398	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup	42.021.600	Dokumen	1	45.000.000	1	26.612.975	1	37.117.770	1	120.451.950	1	137.976.080	1	151.773.688	6	518.932.463	Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	42.021.600	Dokumen	1	45.000.000	1	26.612.975	1	36.837.350	1	121.622.250	1	317.506.770	1	349.257.447	6	896.836.792	Sekretariat Daerah

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau tidak sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil/manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan / penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan
6. Efektif, artinya data / informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Sebagaimana Visi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 "**Mewujudkan Kabupaten Kubu Raya Yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius**", Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*);
2. Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat;
3. Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa Untuk Pembangunan Yang Berkeadilan dan Berdasarkan Pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal;

4. Meningkatkan Penguatan Aktifitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat; dan
5. Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi.

Dari penjabaran diatas, Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Misi : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)
2. Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
3. Tujuan 2 : Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat
4. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
5. Sasaran 2: Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

Visi : Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius												
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (n-1)	Target Kinerja						Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)	1. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat (Nilai)	-	A (80,05)	A (80,15)	A (80,35)	BB (71,20)	BB (71,30)	BB (71,40)	BB (71,40)
	2. Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat	2. Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik	2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat (Nilai)	-	B (84,50)	B (85,00)	B (85,50)	B (85,80)	B (86,00)	B (86,20)	B (86,20)

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Sekretariat Daerah yang akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah tahunan. Penyusunan Rencana Strategis merupakan kegiatan dalam mencari tahu dimana organisasi berada saat ini, kemana arah yang harus dituju organisasi dan bagaimana cara / strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2019-2024 menjadi acuan bagi seluruh unsur / bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, karena :

1. Merupakan alat yang bermanfaat untuk menilai pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dan mengukur seberapa besar pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2019-2024.
2. Memudahkan pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah pada akhir tahun 2024, karena dapat segera dilakukan perbandingan terbalik antara rencana dan realisasi dengan menggunakan lima indikator kinerja, yaitu : *input, output, outcomes, benefit* dan *impact*.

Kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah dengan mengoptimalkan sumber daya aparatur dan alokasi dana anggaran melalui pendekatan kinerja serta prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan kehematan serta rasionalisasi, agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disamping itu, Sekretariat Daerah juga perlu menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan yang akuntabel dalam penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan keuangan.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690603 198903 1 005